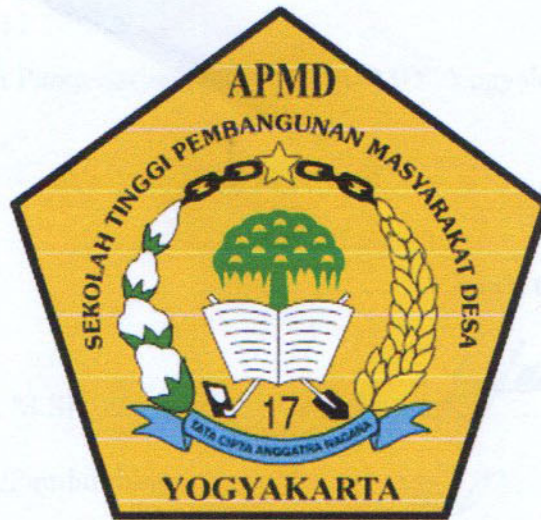


SKRIPSI

STRATEGI KOMUNIKASI PEMBERDAYAAN BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN DIY SEBAGAI IMPLEMENTASI CSR UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT



Disusun Oleh :

Ina Nur Azizah Fajar Aryani

20530031

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA

2024

i



HALAMAN PENGESAHAN

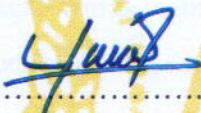
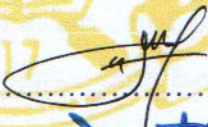

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “STPMD APMD” Yogyakarta pada:

Pada hari : Senin

Tanggal : 5, Februari 2024

Pukul : 10.30 – 11.30

Tempat : Ruang Pasca Sarjana STPMD “APMD” Yogyakarta

Nama	Tanda tangan
1. Dr. Yuli Setyowati, M.Si Ketua Tim Penguji/Pembimbing	
2. Dr. Sugiyanto, M.M Penguji Samping I	
3. Habib Muhsin, S.Sos, M.Si Penguji Samping II	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi



Dr. Yuli Setyowati, M. Si

NIY : 170 230 197

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

NAMA : Ina Nur Azizah Fajar Aryani

NIM : 20530031

JUDUL SKRIPSI : STRATEGI KOMUNIKASI PEMBERDAYAAN BALAI
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
SEBAGAI IMPLEMENTASI CSR UNTUK KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Saya menyatakan bahwa bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Yogyakarta, Februari 2024



Ina Nur Azizah Fajar Aryani

JUDUL SKRIPSI

STRATEGI KOMUNIKASI PEMBERDAYAAN BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA SEBAGAI IMPLEMENTASI CSR UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

ABSTRAK

CSR dalam lingkup pemerintahan diperlukan untuk proses pemberdayaan masyarakat sebagai puncak dari implementasi CSR yakni terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi pemberdayaan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan DIY, mengetahui dampak, dan bagaimana hubungan komunikasi serta hambatan dalam strategi komunikasi pemberdayaan Balai KPH Yogyakarta. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah strategi komunikasi pemberdayaan yang digunakan Balai KPH Yogyakarta yakni (1) Membangun relasi dengan masyarakat (2) Membuat regulasi atau kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung, (3) Membuat rencana dan program kerja, (4) Mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat (5) Pemanfaatan media sosial dan teknologi, (6) Membangun kemitraan, dan (7) Melakukan evaluasi kerja. Bentuk penerapan CSR pemerintahan hanya dapat berpatokan pada regulasi. Penerapan strategi komunikasi pemberdayaan Balai KPH Yogyakarta tersebut cukup efektif walaupun masyarakat masih bergantung pada regulasi yang sewaktu-waktu dapat berubah. Peningkatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat telah dirasakan namun tidak secara signifikan. Tujuan kesejahteraan masyarakat tetap tercapai walau masih perlu adanya pengembangan program pemberdayaan sehingga masyarakat dapat sepenuhnya mandiri.

Kata Kunci : Strategi, Komunikasi Pemberdayaan, CSR, Kesejahteraan

MOTTO

“Man Jadda wa Jadda”

Siapa yang bersungguh sungguh ia akan mencapai tujuannya

(Pepatah Arab)

“Man Shabara Zhafira”

barang siapa yang bersabar, ia akan beruntung

(Pepatah Arab)

“Ya Rabbku, Lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku”

(Q.S Thaha ayat 25-28)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Hasil kerja keras ini saya persembahkan kepada :

1. Diri saya sendiri yang mampu bertahan dalam proses penyusunan skripsi sehingga skripsi dengan judul “Strategi Komunikasi Pemberdayaan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan DIY Sebagai Implementasi CSR untuk Kesejahteraan Masyarakat” dapat terselesaikan dengan baik.
2. Kepada orang tua saya, Ibu Jumini dan Bapak Haryono,S.Sos yang telah senantiasa memberikan kasih sayang, do’a dan dukungan finansial dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3. Helfi Anggit Sardana sebagai teman sekaligus pasangan saya yang selalu menemani keluh kesah saya dalam proses penelitian hingga terselesaikannya skripsi.
4. Seluruh teman-teman saya di Prodi Ilmu Komunikasi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya pembuatan skripsi yang berjudul “Strategi Komunikasi Pemberdayaan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan DIY Sebagai Implementasi CSR Untuk Kesejahteraan Masyarakat” dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Adapun skripsi dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai tugas akhir perkuliahan serta menjadi salah satu syarat kelulusan dalam Program Studi Ilmu Komunikasi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi tentu terdapat pihak yang turut campur tangan dalam upaya memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, ucapan terima kasih penulis ingin sampaikan kepada:

1. Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT. yang telah memeberikan nikmat sehat dan rezeki yang cukup sehingga kelancaran, ketenangan hati serta kekuatan fisik dapat dirasakan dalam penyusunan skripsi.
2. Kedua orang tua serta keluarga yang tentu saja dengan penuh kasih dan cinta yang telah memberikan dukungan serta doa.
3. Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta, Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M. Si yang telah mengesahkan skripsi
4. Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi STPMD “APMD” Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing, Ibu Dr. Yuli Setyowati, S. IP., M.Si yang telah memberikan bimbingan, serta masukan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan ketelitiannya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Sahabat dan teman-teman yang telah membantu memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Yogyakarta, Februari 2024

(Ina Nur Azizah Fajar Aryani)

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	7
B. KEBARUAN PENELITIAN	7
C. RUMUSAN MASALAH	12
D. TUJUAN PENELITIAN	13
E. MANFAAT PENELITIAN	13
E.1 Manfaat Teoritis	13
E.2 Manfaat Praktis	13
F. KAJIAN TEORITIS	14
F.1 Komunikasi	14
F.2 Pemberdayaan	15
F.3 Komunikasi Pemberdayaan	15
F.4 CSR	16
F.5 Strategi Komunikasi	18
F.6 Teori ABCD (Asset Based Community Development)	18
F.7 Teori Stakeholder	20
F.8 Pemberdayaan Untuk Kesejahteraan Masyarakat	21
G. KERANGKA PIKIR	22
H. METODE PENELITIAN	25

H.1 Jenis Penelitian	25
H.2 Lokasi Penelitian	26
H.3 Jenis Data Dan Sumber Data	27
H.4 Teknik Pengumpulan Data	28
H.5 Teknik Pemilihan Informan	32
H.6 Teknik Analisis Data	33
H.7 Teknik Validasi Data.....	35
BAB II DESKRIPSI TEMPAT PENELITIAN.....	38
A. SEJARAH BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN DIY	38
B. VISI DAN MISI BALAI KPH YOGYAKARTA	40
B.1 VISI	40
B.2 MISI	40
C. KEBIJAKAN CSR BALAI KPH YOGYAKARTA	41
D. STRUKTUR ORGANISASI BALAI KPH YOGYAKARTA	42
E. TUGAS DAN FUNGSI	44
E.1 TUGAS	44
E.2 FUNGSI	44
F. PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG	44
G. KEGIATAN PEMBERDAYAAN BALAI KPH YOGYAKARTA	46
H. PROFIL PABRIK PENGOLAHAN MINYAK KAYU PUTIH.....	47
BAB III SAJIAN DATA DAN ANALISIS	50
A. SAJIAN DATA	51
A.1 DESKRIPSI INFORMAN	52
A.2 STRATEGI KOMUNIKASI PEMBERDAYAAN BALAI KPH YOGYAKARTA SEBAGAI IMPLEMENTASI CSR UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	52
A.3 DAMPAK STRATEGI KOMUNIKASI PEMBERDAYAAN BALAI KPH YOGYAKARTA SEBAGAI IMPLEMENTASI CSR UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.....	63
A.4 HUBUNGAN KOMUNIKASI DAN HAMBATAN STRATEGI	

KOMUNIKASI PEMBERDAYAAN BALAI KPH YOGYAKARTA SEBAGAI IMPLEMENTASI CSR UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	73
B. ANALISIS	79
B.1 STRATEGI KOMUNIKASI PEMBERDAYAAN BALAI KPH YOGYAKARTA SEBAGAI IMPLEMENTASI CSR UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.....	79
B.2 DAMPAK STRATEGI KOMUNIKASI PEMBERDAYAAN BALAI KPH YOGYAKARTA SEBAGAI IMPLEMENTASI CSR UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	88
B.3 HUBUNGAN KOMUNIKASI DAN HAMBATAN STRATEGI KOMUNIKASI PEMBERDAYAAN BALAI KPH YOGYAKARTA SEBAGAI IMPLEMENTASI CSR UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	89
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	92
A. KESIMPULAN	92
B. SARAN	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Data Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Gunungkidul	4
Gambar 2 Dampak Kerjasama KPH Yogyakarta	46
Gambar 3 Pemanfaatan Sumber Alam Hutan Sebagai Jasa Lingkungan	47
Gambar 4 Soft file Balai KPH Yogyakarta	50
Gambar 5 Slogan Pabrik Pengolahan Minyak Kayu Putih	59
Gambar 6 Website SIPUH Balai KPH Yogyakarta	60
Gambar 7 Halaman Beranda Website SIPUH Balai KPH Yogyakarta	61
Gambar 8 Media Sosial Balai KPH Yogyakarta	62
Gambar 9 Limbah Daun Kayu Putih	65
Gambar 10 Upah Pekerja Pabrik	70
Gambar 11 Tanaman Tumpangsari yang Ditanami Masyarakat	71
Gambar 12 Pendapatan Pesanggem	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kebaruan Penelitian	7
Tabel 2 Waktu Wawancara	30
Tabel 3 Sebaran Minyak Kayu Putih yang Dikelola oleh Balai KPH Yogyakarta	45
Tabel 4 Kegiatan Pemberdayaan Balai KPH Yogyakarta	46
Tabel 5 Pengelola Pabrik dan Tenaga Kerja Balai KPH Yogyakarta	46
Tabel 6 Identitas Informan	52
Tabel 7 Sebaran Hutan Kayu Putih dan Luas Wilayah	54
Tabel 8 Tabel PAD	72

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Pikir	24
Bagan 2 Struktur Organisasi Balai KPH Yogyakarta	42
Bagan 3 Struktur Organisasi Pabrik Pengolahan Kayu Putih	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Corporate Social Responsibility (CSR) telah menjadi elemen yang semakin penting dalam strategi bisnis berbagai organisasi atau perusahaan, baik di tingkat nasional maupun global. CSR mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk berkontribusi pada kebaikan masyarakat, lingkungan, dan kelompok sosial yang lebih luas.

CSR atau juga dapat disebut dengan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan penenang dari pandangan negatif yang ada di masyarakat serta menjadi solusi perusahaan menjalankan tanggung jawab perusahaan dalam menghadapi persoalan sosial juga lingkungan (Lestari, Hairunnisa, & Boer, 2018). Dalam Suyatna (2012) dikatakan bahwa tujuan dari CSR adalah menciptakan dan memelihara koneksi yang seimbang dengan lingkungan sekitar perusahaan dan bekerjasama dalam memberikan manfaat besar bagi masyarakat luas. Selain itu, penerapan CSR menjadi realitas sosial harus menguntungkan semua pihak yakni pemerintah, perusahaan dan masyarakat

Beberapa perusahaan besar di Indonesia telah menerapkan CSR seperti PT. Pertamina dengan program andalannya *Pinky Movement*. PT. PLN dengan *Co-Forging*, PT. Pegadaian yang lebih fokus pada kemajuan pendidikan dengan menerapkan *The Gade Creative Lounge* di beberapa kampus di Indonesia. Adapun Indosat Ooredoo Hutchison yang gencar terhadap aksi kesetaraan gendernya dengan membuat program CSR *SheHack* (Storyteller, 2023).

Dengan banyaknya perusahaan yang telah menerapkan CSR, bukan berarti mereka sekedar melaksanakan tanpa adanya payung hukum yang menjadi dasar pelaksanaan CSR. Di Indonesia, Payung hukum pelaksanaan CSR terdapat di Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Pasal 74 yaitu Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Pada pasal 74 dituliskan bahwa semua Perseroan Terbatas wajib hukumnya melaksanakan CSR, sehingga tanggung jawab sosial merupakan bagian dari rencana penganggaran perusahaan (Rasyid, Saleh, Cangara, & Priyatna, 2015). Selain itu, terdapat pula pada pasal 15, Pasal 17, dan Pasal 34 UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang di dalamnya mengatur kewajiban bagi perusahaan untuk menyelenggarakan program CSR. (Retnaningsih, 2015). Pedoman mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) yang lebih rinci dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Rincian lebih lanjut terdapat dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. 4 Tahun 2007, yang mencakup aspek-aspek mulai dari alokasi dana hingga prosedur pelaksanaan CSR. (Sudana & Arlindana, 2011).

Adapun secara global, pedoman CSR yakni ISO 26000. ISO 26000 menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah kewajiban suatu organisasi terhadap dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya terhadap masyarakat dan lingkungan. CSR diwujudkan melalui perilaku yang transparan dan etis, sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini harus mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sesuai dengan hukum yang berlaku dan norma-norma perilaku internasional, serta diintegrasikan dengan keseluruhan organisasi. (Retnaningsih, 2015).

Menurut Suyatna (2012) diharapkan CSR tidak hanya menjadi kepentingan bisnis akan tetapi komitmen tanggung jawab sosial dan moral. Harapan lebih besarnya mengenai CSR sesuai dengan pedoman CSR ISO 26000 adalah keberadaan CSR mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana unit ekonomi atau perusahaan itu beroperasi. Ini adalah tantangan yang dihadapi para pemangku kepentingan, akankah mereka mampu berkomitmen untuk saling bertanggung jawab demi kepentingan bangsa atau tidak.

Berangkat dari harapan bahwa program CSR semestinya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk itu diperlukannya komunikasi yang menghubungkan pemerintah, perusahaan dengan masyarakat. Komunikasi yang dilakukan tidak semata-mata hanya bermodalkan kepiawaian dalam berbicara namun harus terdapat sebuah strategi yakni strategi komunikasi. Dapat diibaratkan bahwa strategi komunikasi merupakan buku panduan dari perencanaan komunikasi (*communication planning*) dan manajemen (*communications management*) (Saleh & Sihite, 2020). Strategi komunikasi yang dibuat untuk meningkatkan mutu hidup dan memperbaiki struktur masyarakat sehingga masyarakat dapat berdaya dan mandiri disebut sebagai strategi komunikasi pemberdayaan. Dalam konteks ini, komunikasi pemberdayaan menjadi jembatan yang menghubungkan program CSR dengan masyarakat secara berkelanjutan.

Terkhusus di wilayah Yogyakarta masih terdapat masalah-masalah sosial yang akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu masalah sosial yakni mengenai kemiskinan. Kemiskinan menjadi salah satu indikator untuk menentukan tingkat kesejahteraan rakyat (Budiati, et al., 2020). Menurut website resmi Badan Pusat Statistik DI Yogyakarta, tahun 2023 kabupaten Gunungkidul menjadi salah satu

kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi mencapai 15,60% daripada kabupaten lainnya. Angka ini tepat di bawah kabupaten Kulonprogo yang menempati peringkat pertama.

Gambar 1
Data Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota DI Yogyakarta

Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota (Persen), 2021-2023

[← back](#) [xls](#)
Data series subyek **Kemiskinan dan Ketimpangan** juga dapat diakses melalui **Fitur Tabel Dinamis**.

Data Series : 2021-2023 | 2018-2020 | 2015-2017 | 2012-2014 | 2009-2011 | 2006-2008 | 2003-2005 | 2002-2002

Search:

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2021	2022	2023
D.I. Yogyakarta	12,80	11,34	11,04
Kulonprogo	18,38	16,39	15,64
Bantul	14,04	12,27	11,95
Gunungkidul	17,69	15,86	15,60
Sleman	8,64	7,74	7,52
Kota Yogyakarta	7,69	6,62	6,49

Survei Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik Provinsi D I Yogyakarta

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul

Tabel 1 merupakan data dari tahun 2021-2023 yang menunjukkan tingkat kemiskinan di wilayah Yogyakarta. Dengan adanya data tersebut, pemerintah tentu tidak tinggal diam. Pemerintah telah menyusun program untuk menanggulangi kemiskinan di setiap di wilayah sejak beberapa tahun yang lalu.

Khususnya di kabupaten Gunungkidul, awalnya merupakan wilayah dengan struktur tanah yang gersang sehingga langkah awal yang dipilih pemerintah adalah dengan konservasi tanah dan air. Kelanjutan dari konservasi tersebut adalah penanaman lahan dengan pohon kayu putih. Pohon kayu putih dipilih karena cepat tumbuh sehingga lahan kritis dapat diolah kembali.

Setelah lahan ditanami, pohon kayu putih dapat menyesuaikan dengan lingkungan dan tumbuh dengan subur. Selanjutnya, pemerintah setempat melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya Balai KPH Yogyakarta membangun pabrik untuk pengolahan minyak kayu putih. Pabrik penyulingan minyak kayu putih bertempat di desa Sokoliman II, Kapanewon Bejiharjo, Kalurahan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul. Pabrik minyak kayu putih tersebut dikelola oleh KHP Gelaran dan telah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.

Penemuan masalah tersebut terjadi pada saat dilaksanakannya KKN periode 56 di padukuhan Kedungranti, Kapanewon Nglipar, Kalurahan Nglipar, Gunungkidul, DIY. Disepanjang jalan menuju desa tersebut terbentang luas hutan minyak kayu putih yang dikelola oleh KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) dibawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. KPH memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut andil dalam pengelolaan hutan minyak kayu putih. Masyarakat diperbolehkan menanam tanaman lain selain pohon kayu putih untuk menambah hasil panen mereka.

Instansi pemerintah seperti dinas perlu faham dengan apa yang disebut dengan CSR. Program pemerintah dapat dikombinasikan dengan program CSR untuk menciptakan kolaborasi yang efektif dalam mensejahterakan masyarakat. CSR dapat diimplementasikan oleh perusahaan maupun non perusahaan. Perusahaan dapat digolongkan perusahaan milik pemerintah maupun swasta.

Keberadaan pabrik penyulingan kayu putih diduga merupakan sebagian kecil langkah yang telah dilakukan untuk mengurangi persentase kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera jika mampu mengatasi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan material maupun nonmaterial

(Setyowati, 2019). Tujuan utama pemberdayaan masyarakat pada akhirnya adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, melaksanakan berbagai program pemberdayaan untuk meningkatkan perekonomian dengan cara meningkatkan pendapatan masyarakat (Habib, 2021). Pabrik tersebut adalah sebuah bukti perjuangan pemerintah dalam menyelamatkan kehidupan masyarakat desa, terkhusus padukuhan Sokoliman II, Kapanewon Bejiharjo, Kalurahan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, DIY. Kini, selain menghasilkan minyak kayu putih untuk memenuhi kebutuhan nasional, hutan dan pabrik pun telah mengubah perekonomian masyarakat.

Penelitian dilakukan untuk menjawab sejumlah pertanyaan. Beberapa diantaranya adalah apakah dengan adanya manfaat yang telah dirasakan masyarakat, pabrik naungan dari Balai KPH Yogyakarta telah dikatakan menjalankan program CSR, bagaimana strategi komunikasi pemberdayaan pabrik penyulingan kayu putih dapat berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan masyarakat, dan bagaimana hubungan komunikasi yang dilakukan antara pemerintah, pihak pabrik penyulingan kayu putih dengan masyarakat hingga tercipta program yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat.

Penelitian kualitatif yang lebih mendalam diperlukan untuk menggali aspek-aspek ini. Dengan mengidentifikasi strategi komunikasi pemberdayaan yang digunakan oleh pabrik minyak kayu putih dan menganalisis dampaknya pada kesejahteraan masyarakat, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih baik tentang peran komunikasi dalam meningkatkan efektivitas program CSR dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat.

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang berharga bagi pemahaman tentang bagaimana CSR dapat lebih efektif dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui strategi komunikasi pemberdayaan

B. KEBARUAN PENELITIAN

Tabel 1

Tabel Kebaruan Penelitian

NO.	IDENTITAS JURNAL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	<p>Fachria Octaviani, Santoso Tri Raharjo , Risna Resnawaty</p> <p>Strategi Komunikasi dalam <i>Corporate Social Responsibility</i> Perusahaan Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial “Humanitas” Fisip Unpas, Volume.IV No. 01, Maret 2022</p> <p>https://www.semanticscholar.org/paper/Strategi-Komunikasi-dalam-Corporate-Social-sebagai-Octaviani-Raharjo/7ceff0b8b92b4762c65098d8233e6baf7b074072</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas mengenai strategi komunikasi yang kaitannya dengan CSR. 2. Jurnal ini berisikan bagaimana sebuah strategi komunikasi dapat menyelesaikan masalah-masalah dalam penerapan program CSR yang dibentuk oleh perusahaan. 3. Kesimpulan dari tulisan menyatakan bahwa pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) tidak dapat dipisahkan dari upaya pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan utama dari kegiatan CSR adalah menciptakan masyarakat yang memiliki daya melalui penerapan strategi komunikasi yang efektif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metodologi yang dipilih yakni telaah pustaka yang dibuat deskriptif. 2. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran buku, dan jurnal yang relevan terkait teknik penulisan. Tidak menerangkan secara spesifik lokasi atau nama perusahaan yang menerapkan CSR

2.	<p>Sitti Murniati Muhtar, Hafied Cangara, A. Alimuddin Unde</p> <p>Strategi Komunikasi Dalam Pelaksanaan Program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)</p> <p>Oleh Humas Pt. Semen Tonasa Terhadap Komunitas Lokal Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan</p> <p>Jurnal Komunikasi KAREBA, Volume. II No.1, Maret 2013</p> <p>https://www.neliti.com/publications/96356/strategi-komunikasi-dalam-pelaksanaan-program-corporate-social-responsibility-cs</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jurnal ini masih berhubungan mengenai Strategi komunikasi dan CSR 2. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan mengkaji tentang strategi komunikasi humas dalam pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT. Semen Tonasa. 2. Fokus penelitian berorientasi pada analisis strategi komunikasi Humas PT. Semen Tonasa pada pelaksanaan program CSR dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 3. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan.
----	---	---	--

3.	<p>Ulin Nihayah, Roudhotul Inayah</p> <p>Strategi Komunikasi Penyuluhan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Pada Masyarakat</p> <p>Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, Volume. X No.2, 2022</p> <p>https://www.semanticscholar.org/paper/Strategi-Komunikasi-Penyuluhan-Dalam-Mewujudkan-Nihayah-Inayah/cae795ee6851dc2d307c24ec8cb575248aa98206</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kualitatif deskriptif. 2. Tujuan utama penelitian adalah melihat sejauh mana tingkat kesejahteraan masyarakat melalui Strategi Komunikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti ingin mengetahui gambaran strategi komunikasi yang dilakukan oleh penyuluh PKH dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di Kecamatan Patean, Kendal. 2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh penyuluh PKH dalam pelaksanaan program yang dilakukan berupa : <ol style="list-style-type: none"> a. Penggunaan komunikasi informatif yang dilakukan oleh penyuluh PKH dengan pemberian surat, menginformasikan penyaluran, dan penyampaian materi. b. Komunikasi persuasif dengan penyampaian modul P2K2, dan ajakan graduasi mandiri. c. Penyuluh melakukan komunikasi koersif, dimana dalam komunikasi ini mengharuskan KPM(Keluarga Penerima Manfaat) memenuhi kewajiban, mengikuti vaksinasi. <p>Selain itu terdapat strategi dalam upaya penyuluhan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dilakukan melalui strategi komunikasi dalam penyuluhan diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Metode kooperatif melalui KUBE(Kelompok Usaha Bersama) dengan penyuluhan tatap muka. b. Materi yang disampaikan terkait dengan edukasi PKH dan modul P2K2(Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga). c. Memanfaatkan media audio, laptop, poster, modul, buku, serta media sosial
----	--	---	--

4.	<p>Muhammad Tegar, Yasir</p> <p>STRATEGI KOMUNIKASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Pada Kelompok Usaha Dapur Pesisir Oleh Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Kepulauan Meranti)</p> <p>JOM FISIP Vol.XI Edisi 2 Tahun 2019</p> <p>https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1461110</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jurnal tersebut membahas mengenai strategi komunikasi pemberdayaan 2. Penelitian ini melibatkan pendekatan kualitatif deskriptif 3. Penelitian yang dipilih secara purposive dan insidental. 4. Metode pengumpulan data mencakup wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. 5. Peneliti menerapkan teknik triangulasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian menggunakan model komunikasi partisipatif yang dikembangkan oleh Lawrence Kincaid dan Everett M. Rogers.
----	---	---	--

Dari beberapa perbandingan penelitian tersebut menjelaskan bahwa penelitian pertama memiliki fokus penelitian bagaimana sebuah strategi komunikasi dapat menyelesaikan masalah-masalah dalam penerapan program CSR yang dibentuk oleh perusahaan secara general. Penelitian kedua berorientasi pada analisis strategi komunikasi Humas PT. Semen Tonasa pada pelaksanaan program CSR dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ketiga memiliki fokus penelitian tentang strategi yang dilakukan oleh penyuluh PKK dalam pelaksanaan program yang dilakukan dan strategi komunikasi dalam upaya penyuluhan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Penelitian keempat menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan oleh PKK Kabupaten Kepulauan Meranti melibatkan beberapa tahap dan berpengaruh pada kesejahteraan PKK Kabupaten Kepulauan Meranti. Model komunikasi yang digunakan oleh PKK Kabupaten Kepulauan Meranti adalah model Komunikasi Partisipatif Kincaid.

Fokus penelitian ini yakni mengetahui bagaimana Strategi komunikasi pemberdayaan sebagai implementasi CSR Balai KPH Yogyakarta dapat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Penelitian pertama dan kedua masih memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena membahas mengenai lingkup strategi komunikasi dan CSR. Penelitian ketiga juga masih memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena membahas mengenai strategi komunikasi dan kesejahteraan rakyat.

C. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana strategi komunikasi pemberdayaan Balai KPH Yogyakarta melalui implementasi CSR untuk kesejahteraan masyarakat?

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengidentifikasi strategi komunikasi pemberdayaan Balai KPH Yogyakarta sebagai implementasi CSR untuk kesejahteraan masyarakat
2. Untuk mengetahui dampak strategi komunikasi pemberdayaan Balai KPH Yogyakarta sebagai implementasi CSR untuk kesejahteraan masyarakat
3. Untuk mengetahui hubungan komunikasi dan hambatan dalam penerapan strategi komunikasi pemberdayaan Balai KPH Yogyakarta sebagai implementasi CSR untuk kesejahteraan rakyat.

E. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis.

E.1 Manfaat Teoritis

1. Dapat memperluas wawasan mengenai strategi komunikasi pemberdayaan Balai KPH Yogyakarta melalui implementasi CSR untuk kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu topik utama dalam kajian ilmu komunikasi.
2. Menjadikan hasil penelitian skripsi sebagai acuan atau pengembangan dari penelitian lanjutan terhadap objek sejenis atau aspek yang belum tercakup dalam penelitian.

E.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan masukan atau informasi kepada pihak-pihak terkait yakni pemerintah dan pengelola pabrik penyulingan minyak kayu putih dalam implementasi CSR.

2. Sebagai bahan bacaan masyarakat guna menambah pengetahuan mengenai implementasi CSR Balai KPH dengan adanya pabrik penyulingan minyak kayu putih.

F. KAJIAN TEORITIS

F.1 Komunikasi

Pengertian komunikasi menurut beberapa para ahli yakni:

- a. Menurut Raymond Ross, komunikasi merupakan suatu proses dimana simbol-simbol dipilah, dimiliki, dan dikirim dengan cara yang dapat membantu pendengar untuk merespons atau mengerti pemikiran yang sesuai dengan yang ingin disampaikan oleh seseorang yang berkomunikasi (Supriyanto, 2017).
- b. Menurut Onong Uchjana Effendy, komunikasi adalah suatu proses untuk menyampaikan pesan dari satu individu kepada individu lainnya dengan maksud untuk memberitahu atau mengungkapkan gagasan-gagasan yang dimiliki (Supriyanto, 2017).
- c. Menurut Forsdale, komunikasi merupakan sebuah proses di dalam suatu sistem yang terbentuk, dipelihara, dan diubah dengan tujuan agar sinyal-sinyal yang dikirimkan dapat diterima sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (Supriyanto, 2017).

Dari pengertian beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan suatu proses untuk menyampaikan pesan yang berupa simbol-simbol kemudian dapat dimaknai dengan jelas oleh penerima pesan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

F.2 Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah proses untuk memberikan kekuatan kepada pihak yang lemah dan mengurangi dominasi pihak yang kuat guna mencapai keseimbangan (Djohani dalam Tegar, 2019). Rappaport (1984) juga menggambarkan pemberdayaan sebagai cara untuk membantu masyarakat dan komunitas mengambil kendali atas kehidupan mereka (Anwas dalam Tegar, 2019). Hal tersebut melibatkan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok yang rentan, termasuk individu yang miskin, dengan tujuan mencapai keadilan sosial dan meningkatkan kemandirian serta pengetahuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Pada penelitian ini, konsep pemberdayaan diatur oleh regulasi pemerintah melibatkan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dan diawasi oleh pemerintah untuk memperkuat keberdayaan masyarakat. Dapat mencakup program-program sosial, kebijakan ekonomi, dan upaya pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan kemandirian, pengetahuan, dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam konteks ini, regulasi pemerintah berperan dalam menetapkan aturan dan standar yang mengatur implementasi serta evaluasi dari program-program pemberdayaan tersebut.

F.3 Komunikasi Pemberdayaan

Tindakan komunikatif masyarakat mencerminkan peningkatan kemampuan mereka dalam berinteraksi, baik secara personal, dalam kelompok, maupun antar-kelompok. Dengan kemampuan komunikasi yang meningkat, masyarakat menjadi lebih terampil dalam berkolaborasi, membuat mereka lebih mandiri dan kreatif. Ini disebut sebagai komunikasi pemberdayaan, di mana proses komunikasi ini

menghargai martabat manusia, melibatkan partisipasi, dan memberi suara kepada mereka yang sebelumnya tidak terdengar (Setyowati, 2019).

Komunikasi pemberdayaan dapat dikolaborasikan dengan tindakan regulatif pemerintah seperti pada penelitian ini. Komunikasi tersebut menekankan kerja sama dan pengaturan terorganisir untuk memberdayakan individu atau kelompok. Komunikasi pemberdayaan kooperatif regulatif merupakan bentuk komunikasi yang dalam pendekatannya melibatkan kolaborasi aktif di antara semua pihak yang terlibat, dengan tujuan mencapai pemberdayaan bersama. Unsur regulatif mengarahkan komunikasi sesuai dengan kerangka kerja atau aturan yang telah ditetapkan, untuk menjalankan proses komunikasi secara efektif. Melalui pendekatan ini, individu atau kelompok dapat merasakan dampak positif signifikan dalam pengembangan diri mereka, dengan kerja sama yang memungkinkan pertukaran pengetahuan dan keterampilan serta pengaturan yang terorganisir memperkuat proses pertumbuhan dan pengembangan mereka secara berkelanjutan.

F.4 CSR (*Corporate Social Responsibility*)

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan inisiatif yang diambil oleh pelaku bisnis atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan bertindak secara sosial bertanggung jawab terhadap masyarakat. Dalam melaksanakan kewajiban sosial ini, pelaku bisnis atau perusahaan mengutamakan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Fokus pada tiga dimensi ini dianggap sebagai tindakan yang berkelanjutan dan merupakan salah satu strategi untuk mencegah terjadinya krisis dengan cara meningkatkan reputasi atau citra (Sari dalam Nayenggita, Raharjo, & Resnawaty, 2019).

Terdapat dua konsep CSR, yaitu dalam arti luas dan arti sempit. CSR dalam arti luas berkaitan erat dengan tujuan mencapai kegiatan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic activity*). Keberlanjutan dalam kegiatan ekonomi tidak hanya melibatkan tanggung jawab sosial, tetapi juga mencakup akuntabilitas perusahaan terhadap masyarakat, bangsa, dan komunitas internasional. CSR diartikan sebagai bentuk kerjasama antara perusahaan (bukan hanya Perseroan Terbatas) dengan seluruh pihak (*stakeholders*) yang berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan, dengan tujuan untuk menjamin keberlanjutan dan kelangsungan hidup usaha perusahaan tersebut (Nayenggita, Raharjo, & Resnawaty, 2019).

Adapun dalam CSR terdapat sebuah konsep yakni Konsep Triple Bottom Line (TBL) dalam Corporate Social Responsibility (CSR) diperkenalkan oleh John Elkington pada tahun 1994. Model ini menggambarkan tiga dimensi atau "*bottom lines*" yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan dalam menilai dampak sosial dan lingkungan mereka, selain aspek keuangan. Ketiga dimensi tersebut melibatkan "*People*" (Manusia), "*Planet*" (Bumi), dan "*Profit*" (Keuntungan). Aspek "*People*" berfokus pada hubungan dengan karyawan, komunitas, dan keamanan kerja. Sementara itu, dimensi "*Planet*" mencakup tanggung jawab lingkungan, seperti upaya perlindungan lingkungan dan efisiensi energi. Aspek terakhir, "*Profit*," tetap mempertimbangkan dimensi keuangan, namun, dalam konteks TBL, keuntungan dipandang sebagai keberlanjutan jangka panjang yang tidak hanya terbatas pada dimensi finansial.

Dengan menerapkan konsep TBL CSR, perusahaan diharapkan dapat mencapai keseimbangan yang sehat antara keuntungan ekonomi, kepedulian sosial, dan

keberlanjutan lingkungan. Pendekatan ini menegaskan bahwa keberlanjutan jangka panjang memerlukan perhatian serius terhadap semua tiga aspek tersebut, tidak hanya fokus pada aspek keuangan semata.

F.5 Strategi Komunikasi

Menurut Effendy (2017) Strategi komunikasi meliputi perencanaan dan pengelolaan yang efektif dalam menyampaikan pesan agar mudah dipahami oleh penerima pesan, dengan tujuan untuk mengubah sikap atau perilaku individu. Menurut Middleton dalam Cangara (2017), strategi komunikasi adalah gabungan terbaik dari semua unsur komunikasi, seperti komunikator, pesan, media, penerima, dan dampak yang diharapkan untuk mencapai tujuan komunikasi secara optimal. Strategi komunikasi ini melibatkan pengelolaan menyeluruh terhadap semua aspek komunikasi karena komunikasi merupakan proses yang melibatkan semua unsur tersebut.

Strategi komunikasi, seperti yang dijelaskan oleh Effendy (2017) dan Middleton dalam Cangara (2017), juga terkait dengan regulasi pemerintah dalam konteks penyelenggaraan komunikasi yang efektif. Regulasi ini memengaruhi perencanaan dan pelaksanaan strategi komunikasi, termasuk kebijakan media dan standar informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Sehingga, strategi komunikasi harus mempertimbangkan regulasi pemerintah untuk mencapai tujuan komunikasi yang diinginkan.

F.6 Teori ABCD (*Asset Based Community Development*)

Salah satu metode yang dapat digunakan dalam upaya pemberdayaan masyarakat adalah pendekatan ABCD (*Asset Based Community Development*). Model ini berfokus pada pemanfaatan aset dan potensi yang ada di komunitas masyarakat

setempat (Maulana, 2019). *Asset Based Community Development (ABCD)* atau dikenal sebagai Pengembangan Komunitas Berbasis Aset (PKBA) adalah kerangka kerja yang dirancang oleh John McKnight dan Jody Kretzmann.

Dengan cara yang sederhana, pendekatan ABCD dapat diartikan sebagai suatu pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada pemanfaatan aset lokal di suatu wilayah. Aset-aset tersebut dikembangkan untuk mengatasi permasalahan yang ada di wilayah tempat pemberdayaan dilakukan (Fithriyana, 2020).

Dalam pendekatan ABCD, masyarakat yang menjadi fokus pemberdayaan dianggap bukan sebagai kelompok yang lemah atau tanpa potensi. Sebaliknya, mereka dianggap memiliki potensi untuk mengatasi berbagai permasalahan, termasuk permasalahan peningkatan taraf hidup (sosial-ekonomi). Dengan kata lain, masyarakat yang mungkin terlihat tidak berdaya sebenarnya mengalami kendala karena kurangnya akses untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki atau karena terbatasnya sistem sumber daya yang dapat membantu mereka dalam memanfaatkan potensi tersebut.

Secara umum, pendekatan ABCD memiliki empat komponen yang perlu diperhatikan, yaitu Pendekatan Berbasis Masalah (*Problem Based Approach*), Pendekatan Berbasis Kebutuhan (*Need Based Approach*), Pendekatan Berbasis Hak (*Right Based Approach*), dan Pendekatan Berbasis Aset (*Asset Based Approach*) (Widjajanti dalam Habib, 2021).

1. Pendekatan Berbasis Masalah (*Problem Based Approach*)

Masyarakat perlu menyadari masalah yang dihadapi, karena kesadaran ini mendorong mereka untuk mencari solusi atau perubahan kondisi yang dihadapi.

2. Pendekatan Berbasis Kebutuhan (*Need Based Approach*)

Mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anggota masyarakat sebagai prioritas utama sebelum pemberdayaan dimulai. Kebutuhan seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal harus diprioritaskan untuk memastikan masyarakat siap menerima inovasi.

3. Pendekatan Berbasis Hak (*Right Based Approach*)

Menggunakan sumber daya sebagai modal awal untuk memulai usaha perubahan menuju kemandirian. Dana awal ini mendukung kegiatan pemberdayaan dan sangat penting dalam operasional awal program.

4. Pendekatan Berbasis Aset (*Asset Based Approach*)

Mempertimbangkan potensi yang sudah ada dalam masyarakat, seperti kecerdasan, kepedulian, partisipasi, gotong royong, dan solidaritas. Potensi ini dianggap sebagai aset berharga yang, jika dikembangkan, dapat menciptakan kecerdasan sosial dan inovasi baru dalam usaha masyarakat.

Selain empat aspek tersebut, ada satu aspek tambahan, yaitu aspek Sumber Daya Alam (SDA), yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat. Kekayaan alam memainkan peran penting dalam kesuksesan program pemberdayaan. SDA dianggap sebagai faktor eksternal dalam pendekatan ABCD karena merupakan kekayaan alam yang tersedia untuk masyarakat tertentu, seperti tanah subur, keindahan alam, atau sumber daya alam lainnya (Suardi, Mallongi, & Baharuddin dalam Habib, 2021).

F.7 Teori Stakeholders

Teori *stakeholder* pertama kali dipopulerkan oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984 dalam bukunya “*Strategic Management: A Stakeholder Approach*”. Namun, konsep ini telah dikembangkan dan diperluas. Dalam konteks ini,

pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan, memberdayakan, dan memberikan kemandirian kepada masyarakat agar dapat menciptakan perubahan yang bertujuan meningkatkan potensi daerah. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah sebagai inisiator, penyusun, dan pelaku pemberdayaan, serta pihak swasta, akademisi, masyarakat yang diberdayakan, dan berbagai pihak lainnya. Peran pemangku kepentingan tersebut tidak dapat dilakukan secara terpisah atau mandiri, tetapi harus dilakukan secara kolektif dan sinergis untuk mencapai tujuan bersama (Habib, 2021).

Asumsi dasar dari teori *stakeholders* menyatakan bahwa semakin kuat hubungan antara pemangku kepentingan, semakin baik hasil yang dapat dicapai dalam pemberdayaan masyarakat. Sebaliknya, jika hubungan antara pemangku kepentingan buruk, maka keberhasilan dalam upaya pemberdayaan masyarakat akan menjadi lebih sulit. Hubungan yang kuat antara pemangku kepentingan didasarkan pada nilai kepercayaan, rasa hormat, dan kerjasama. Teori pemangku kepentingan merupakan sebuah konsep dalam strategi manajemen yang bertujuan untuk membantu pemangku kepentingan memperkuat hubungan dengan kelompok-kelompok eksternal guna mencapai kerjasama yang baik (Mardikanto dalam Habib, 2021).

F.8 Pemberdayaan untuk Kesejahteraan Masyarakat

Pemberdayaan berorientasi kesejahteraan adalah ketika dirancang dan dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya meningkatkan produksi. Pemberdayaan ini mencerminkan kemampuan individu, terutama kelompok yang rentan dan lemah, untuk mendapatkan akses ke sumber daya produktif yang memungkinkan mereka meningkatkan pendapatan dan

memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang mereka perlukan. Selain itu, pemberdayaan juga melibatkan partisipasi mereka dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan pendapatan juga sering dikembangkan dalam upaya pemberdayaan masyarakat, karena kemiskinan merupakan penyebab utama ketidakberdayaan (Mardikanto & Soebiato dalam Parida & Setiamandani, 2019).

Terdapat empat indikator keberdayaan yang menyangkut derajat keberdayaan yakni:

- a. Tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah (*power to*).
- b. Tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses (*power within*).
- c. Tingkat kemampuan menghadapi hambatan (*power over*).
- d. Tingkat kemampuan kerjasama dan solidaritas (*power with*) (Soeharto dalam Firmansyah, 2012).

G. KERANGKA PIKIR

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah landasan berpikir suatu penelitian yang dihasilkan dari sintesis fakta-fakta, observasi, dan studi kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka berpikir mencakup teori, dalil, atau konsep-konsep yang menjadi dasar dalam pelaksanaan penelitian. Dalam kerangka pemikiran ini, variabel-variabel penelitian diuraikan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti, sehingga dapat menjadi dasar untuk merespon permasalahan penelitian. Kerangka berpikir menjadi alat bantu peneliti untuk menganalisis perencanaan dan mendukung argumen terhadap arah asumsi yang akan diambil. Dalam penelitian kuantitatif, kecenderungan akhirnya adalah untuk menerima atau menolak hipotesis penelitian,

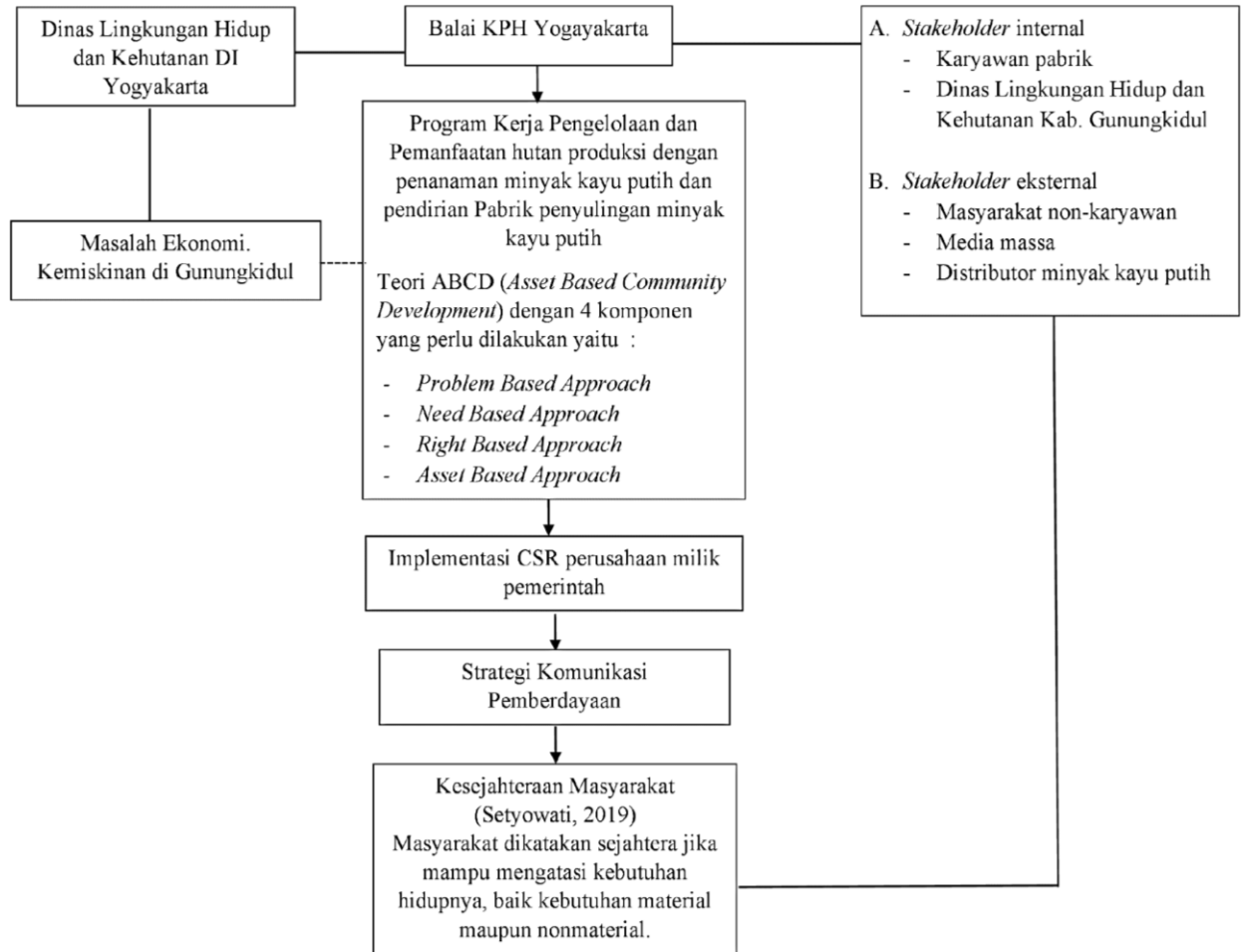
sementara penelitian yang bersifat deskriptif atau naratif didasarkan pada data dan menggunakan teori sebagai penjelasan, berakhir dengan memperbarui suatu pernyataan atau hipotesis (Syahputri, Fallenia, & Syafitri, 2023).

Menurut Widayat dan Amirullah (2002), kerangka berpikir atau kerangka konseptual merupakan model konseptual yang menjelaskan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang signifikan. Kerangka berpikir juga memberikan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek penelitian. Alur berpikir ini, didasarkan pada teori-teori sebelumnya dan pengalaman empiris, menjadi dasar untuk menyusun kerangka berpikir yang bermanfaat dalam membangun hipotesis. Dengan demikian, kerangka berpikir berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan hipotesis penelitian (Syahputri, Fallenia, & Syafitri, 2023).

Sesuai dengan Sugiono (2019), kerangka berpikir adalah suatu model konseptual yang menggambarkan bagaimana teori berinteraksi dengan berbagai aspek yang telah diidentifikasi. Kerangka berpikir penelitian menjadi dasar pemikiran yang disusun dari fakta-fakta, observasi, dan tinjauan pustaka. Di dalamnya terdapat teori, dalil, dan konsep-konsep yang menjadi landasan dalam penelitian. Kerangka berpikir ini menjelaskan hubungan dan keterkaitan antar variabel. Representasi kerangka berpikir dapat disajikan dalam bentuk diagram yang menunjukkan alur pemikiran peneliti serta interaksi antar variabel yang menjadi fokus penelitian (Riduwan dalam Syahputri, Fallenia, & Syafitri, 2023). Untuk itu, kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan melalui bagan sebagai berikut:

Bagan 1

Kerangka Pikir



Bagan kerangka pikir di atas dapat dijelaskan bahwa masalah ekonomi berupa kemiskinan menjadi salah satu isu yang diperhatikan oleh Pemerintah kabupaten Gunungkidul. Melalui Balai KPH Yogyakarta yang berada dibawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki program kerja pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi hutan lindung. Salah satu cara pemanfaatan hutan produksi yakni dengan penanaman pohon minyak kayu putih dan pengelolaannya dengan mendirikan pabrik

penyulingan minyak kayu putih. Balai KPH Yogyakarta mengatur seluruh aktivitas pabrik melalui berbagai regulasi. Adanya Pabrik penyulingan minyak kayu putih merupakan Implementasi CSR Balai KPH Yogyakarta. Implementasi CSR memerlukan sebuah strategi komunikasi pemberdayaan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program kerja Balai KPH Yogyakarta telah berdampak kepada masyarakat. Untuk memastikan program tersebut tepat sasaran maka dilakukan analisis menggunakan Teori ABCD (*Asset Based Community Development*). Diharapkan dengan mengetahui strategi komunikasi pemberdayaan Balai KPH Yogyakarta, tujuan akhir implementasi CSR Balai KPH melalui pabrik penyulingan minyak kayu putih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar pabrik.

H. METODOLOGI PENELITIAN

H.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah serta menimbang tujuan penelitian mengenai strategi komunikasi pemberdayaan Balai KPH Yogyakarta melalui implementasi CSR untuk kesejahteraan masyarakat maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif.

Menurut Sugiyono (2019) penelitian deskriptif adalah penelitian yang menentukan suatu variabel bebas atau satu atau lebih nilai (independen) tanpa perbandingan atau asosiasi dengan variabel lain. Maka dapat dijelaskan dalam penelitian deskriptif, peneliti berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang bagaimana suatu fenomena terjadi dan bagaimana karakteristik atau variabel-variabel tertentu berkaitan dengan fenomena tersebut.

Menurut Sugiyono (2019), metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang berasaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini digunakan untuk menyelidiki objek dengan kondisi alamiah, yakni keadaan yang sebenarnya (riil), tanpa disetting atau melibatkan eksperimen, di mana peneliti menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan penelitian.

H.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian yakni tempat atau wilayah yang dipilih untuk penelitian yang dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahapan yang cukup penting untuk mempermudah dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini, pemilihan tempat penelitian harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang relevan dengan tujuan penelitian dan karakteristik metodologi kualitatif. Beberapa alasan peneliti melakukan penelitian di tempat ini yakni tempat penelitian dipilih karena dapat mendukung penemuan data tentang CSR yang dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana strategi komunikasi pemberdayaan diterapkan, akses mudah terhadap informan utama atau partisipan penelitian yang memiliki pengalaman atau pengetahuan yang relevan dengan topik penelitian, tempat penelitian dapat dijangkau dengan biaya dan waktu yang terbatas, pemilihan tempat yang dikenal atau memiliki keterkaitan dengan peneliti dapat mempermudah pengumpulan data dan membangun hubungan dengan informan. Penemuan masalah ekonomi yang peneliti temukan pada saat KKN, menjadi alasan peneliti untuk meninjau lebih jauh tentang keterlibatan instansi pemerintah melalui programnya untuk mensejahterakan masyarakat.

Berikut merupakan ketentuan tempat dan waktu pelaksanaan penelitian:

Tempat : KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) di bawah Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan DIY dan Pabrik Penyulingan Minyak Kayu

Putih Gelaran

Alamat : Padukuhan Sokoliman II, Bejiharjo, Kec. Karangmojo, Kab.

Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Waktu : November 2023 – Januari 2024

H.3 Data Dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dapat diartikan sebagai fakta atau sebuah informasi yang diperoleh dari informan, aktivitas, dan tempat yang menjadi subjek penelitian. Perolehan data primer didapat melalui hasil wawancara dan hasil observasi di lapangan. Dalam wawancara yang menjadi informan yakni:

1. Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan Balai KPH Yogyakarta, Bp. Supriyono
2. Koordinator pabrik penyulingan minyak kayu putih, Bp. Suranto
3. Bagian Administratif pabrik penyulingan minyak kayu putih Bapak. Antonius Didik Arwanto.
4. Kepala Dusun Sokoliman II, Bapak Wariyadi
5. Satu warga yang bekerja sebagai karyawan pabrik penyulingan minyak kayu putih, Bapak Wawan Nugroho.
6. Dua warga sekitar pabrik non karyawan, Ibu Sanem dan Ibu Fatimah.

b. Data Sekunder

Data sekunder dari penelitian ini berupa dokumen *soft file* dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan D.I Yogyakarta, dokumentasi foto, catatan lapangan, dan literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian.

H.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap partisipan dan konteks yang terlibat dalam fenomena penelitian. Observasi kualitatif dapat dilakukan dalam situasi nyata atau di lingkungan yang telah dirancang khusus untuk tujuan penelitian. Melalui observasi, peneliti diberikan kesempatan untuk mengamati interaksi sosial, perilaku, dan konteks yang relevan dengan fenomena yang sedang diteliti. (Ardiansyah, Risnita, & Jailani, 2023)

Dalam penelitian tentang “Strategi Komunikasi Pemberdayaan Balai KPH Yogyakarta melalui Implementasi CSR untuk Kesejahteraan Masyarakat,” beberapa hal yang dapat diobservasi meliputi:

1. Tujuan Program: Penelitian dapat mengobservasi tujuan dari program CSR tersebut, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar pabrik penyulingan minyak kayu putih. Ini dapat meliputi aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, atau lingkungan.
2. Alat Komunikasi: Penelitian mengobservasi alat komunikasi yang digunakan dalam program CSR tersebut, seperti media sosial, brosur, seminar, atau pertemuan komunitas. Hal ini dapat membantu dalam memahami bagaimana pabrik pengolah minyak kayu putih berkomunikasi dengan masyarakat.
3. Metode Komunikasi: Penelitian dapat mengobservasi metode komunikasi yang digunakan dalam program CSR tersebut, seperti komunikasi satu arah atau dua arah. Jika program tersebut menerapkan pendekatan partisipatif,

penelitian dapat mengobservasi bagaimana masyarakat diajak untuk berpartisipasi dalam program CSR dan memberikan masukan atau saran.

4. **Pesan Komunikasi:** Penelitian dapat mengobservasi pesan-pesan yang disampaikan dalam program CSR tersebut. Apakah pesan tersebut terkait dengan manfaat minyak kayu putih bagi kesehatan masyarakat atau dengan potensi lapangan kerja yang dapat diciptakan oleh pabrik, atau aspek lainnya. Ini dapat membantu dalam memahami narasi yang digunakan dalam komunikasi pemberdayaan dalam program CSR tersebut.
5. **Efektivitas Komunikasi:** Penelitian dapat mengobservasi efektivitas komunikasi yang dilakukan oleh pabrik penyulingan minyak kayu putih. Hal ini dapat meliputi apakah pesan yang disampaikan efektif dalam menciptakan kesadaran dan pemahaman di antara masyarakat sekitar pabrik, serta apakah pesan tersebut menghasilkan perubahan yang positif dalam kesejahteraan mereka.
6. **Keterlibatan Masyarakat:** Penelitian dapat mengobservasi sejauh mana partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam program CSR tersebut. Misalnya, penelitian dapat melihat apakah masyarakat diberikan kesempatan untuk menjadi mitra dalam implementasi program atau apakah ada proses evaluasi bersama dengan masyarakat mengenai dampak program tersebut.
7. **Dampak Program:** Penelitian juga dapat mengobservasi dampak yang dihasilkan dari program CSR pabrik penyulingan minyak kayu putih. Ini dapat meliputi perubahan positif dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat, kualitas hidup, taraf pendidikan, atau kesadaran terhadap lingkungan.

Observasi ini akan memberikan gambaran tentang keberhasilan strategi komunikasi pemberdayaan yang digunakan dalam program CSR tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah metode pengumpulan data yang melibatkan komunikasi langsung antara peneliti dan peserta penelitian. Tujuan dari wawancara kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai pengalaman, pandangan, dan perspektif individu terkait fenomena yang sedang diteliti. Wawancara dapat dilakukan dengan struktur yang telah ditentukan sebelumnya, dengan sedikit struktur, atau bahkan tanpa struktur sama sekali, tergantung pada tingkat keberpihakan yang telah ditentukan sebelumnya. (Ardiansyah, Risnita, & Jailani, 2023).

Peneliti melakukan enam kali wawancara dengan para informan. Wawancara dilakukan di tempat dan waktu yang berbeda-beda. Berikut keterangan waktu wawancara yang peneliti lakukan :

Tabel 2

Waktu Wawancara

No.	Nama	Pekerjaan	Waktu Wawancara
1.	Antonius Didik Arwanto	Administrasi Pabrik	15 November 2023
2.	Supriyono	Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan	18 Desember dan 20 Desember 2023
3.	Bapak Suranta	Kepala Pabrik Pengolahan Minyak Kayu Putih	27 Desember 2023
4.	Wariyadi	Kepala Dusun Sokoliman II	16 Januari 2024
5.	Fatimah	Masyarakat	16 Januari 2024
6.	Sanem	Masyarakat	16 Januari 2024
7.	Wawan	Pekerja Pabrik	20 Januari 2024

c. Dokumentasi

Dalam proses dokumentasi, peneliti mengumpulkan data dari dokumen yang berkaitan dengan fenomena penelitian yang tengah diteliti. Dokumen yang digunakan dalam dokumentasi dapat beragam, mulai dari catatan, laporan, surat, buku, hingga dokumen resmi lainnya (Creswell dalam Ardiansyah, Risnita, & Jailani, 2023).

Dokumentasi memberikan wawasan tentang konteks historis suatu fenomena. Dengan mengumpulkan data dari dokumen-dokumen tertulis yang sudah ada, peneliti dapat memahami bagaimana fenomena tersebut berkembang dari waktu ke waktu (Creswell dalam Ardiansyah, Risnita, & Jailani, 2023).

Selain itu, dokumentasi juga dapat memberikan informasi mengenai kebijakan dan peristiwa yang terkait dengan fenomena yang diteliti. Data dari dokumen-dokumen tersebut dapat membantu peneliti memahami berbagai kebijakan yang pernah ada atau peristiwa yang terjadi seiring dengan perkembangan fenomena yang menjadi fokus penelitian (Creswell dalam Ardiansyah, Risnita, & Jailani, 2023).

Dokumen yang peneliti dapatkan berupa foto kegiatan wawancara bersama informan, foto kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Balai KPH Yogyakarta dan foto proses pengolahan kayu putih.

Dengan demikian, dokumentasi merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan informasi yang relevan dan mendalam tentang fenomena penelitian. Dengan mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang berkaitan, peneliti dapat memperoleh wawasan yang

lebih komprehensif tentang fenomena yang tengah diteliti (Creswell dalam Ardiansyah, Risnita, & Jailani, 2023).

H.5 Teknik Pemilihan Informan

Teknik sampling atau teknik pemilihan informan penelitian ini menggunakan teknik sampel bertujuan atau *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sebuah teknik pengambilan sampel yang tidak acak, dimana peneliti memilih contoh yang sesuai dengan tujuan riset agar dapat memberikan tanggapan yang relevan terhadap kasus yang sedang diteliti (Lenaini, 2021).

Dengan mempertimbangkan tujuan penelitian dan jenis informasi yang ingin peneliti peroleh, maka pemilihan informan dalam *purposive sampling* ini yakni:

- a. Informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait program CSR pabrik penyulingan minyak kayu putih
- b. Informan yang memiliki pemahaman mendalam atau pengalaman praktis dalam bidang CSR
- c. Informan dapat dijangkau dan bersedia berpartisipasi dalam penelitian dengan mempertimbangkan faktor lokasi dan ketersediaan waktu.

Untuk itu, peneliti memilih beberapa informan seperti:

1. Kepala seksi Pemanfaatan Hutan Balai KPH Yogyakarta, Bapak Supriyono
2. Bagian Administratif pabrik penyulingan minyak kayu putih Bapak. Antonius Didik Arwanto.
3. Kepala Pabrik penyulingan minyak kayu putih, Bapak Suranta
4. Kepala Dusun Sokoloman II, Bapak Wariyadi
5. Satu warga yang bekerja sebagai karyawan pabrik penyulingan minyak kayu putih.

6. Dua warga sekitar pabrik non karyawan, Ibu Sanem dan Ibu Fatimah.

H.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah teknik yang dilakukan untuk mempelajari dan menganalisis data-data untuk menghasilkan data yang benar-benar bisa dipercaya. Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan teknik kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tradisi ilmu sosial yang khas yang pada dasarnya didasarkan pada melihat dan berhubungan dengan orang-orang dalam dimensi mereka pribadi.

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014) menyarankan agar kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilanjutkan sampai akhir agar datanya jenuh. Langkah-langkah dalam analisis data, yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses mengurangi jumlah variabel atau atribut dalam suatu kumpulan data tanpa mengurangi informasi yang terkandung dalam data tersebut. Tujuan dari reduksi data adalah untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi analisis data, serta memudahkan pemrosesan dan interpretasi data. Data yang telah direduksi dengan demikian memberikan gambaran yang lebih jelas, sehingga memudahkan peneliti untuk mengumpulkan dan mencari informasi pada saat diperlukan. Dengan melakukan cara ini, informasi yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumen dikumpulkan, diseleksi dan dikelompokkan, kemudian diselesaikan tanpa menghilangkan nilai dari informasi itu sendiri.

b. Penyajian data

Penyajian data yaitu pelaksanaan pengumpulan data yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Dalam penelitian

kualitatif, materi dapat disajikan dalam bentuk deskripsi singkat, diagram, hubungan antar kategori, atau flowchart. Dalam penelitian kualitatif, materi paling sering disajikan dalam bentuk teks naratif. Dalam penelitian kualitatif, materi paling sering disajikan dalam teks naratif dan dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, *flowchart*, hubungan antar kategori, diagram atau sejenisnya.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif. Kesimpulan dalam analisis data kualitatif adalah hasil akhir dari proses pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data kualitatif yang dilakukan oleh peneliti. Kesimpulan ini berisi rangkuman dari temuan-temuan utama yang dihasilkan dari analisis data kualitatif dan menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

Kesimpulan dalam analisis data kualitatif dapat berupa deskripsi tentang tema-tema atau pola-pola yang muncul dari data yang dikumpulkan, atau jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang dijawab berdasarkan interpretasi data kualitatif. Kesimpulan yang dihasilkan dari analisis data kualitatif harus didasarkan pada bukti-bukti yang ditemukan dalam data yang dikumpulkan, dan harus disusun dengan cara yang sistematis dan jelas, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Kesimpulan ini juga harus bersifat reflektif, artinya peneliti harus secara kritis mempertimbangkan kelemahan dan kekuatan dari analisis yang telah dilakukan.

H.7 Teknik Validasi Data

Teknik validasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi merupakan pendekatan dalam analisis data yang menggabungkan data dari berbagai sumber. Menurut *Institute of Global Tech* yang dapat diakses secara online, triangulasi digunakan untuk menguji dan memperkuat tafsir data yang sudah ada serta untuk meningkatkan kebijakan dan program yang didasarkan pada bukti-bukti yang ada. Teknik ini melibatkan pengumpulan data melalui metode yang berbeda, melibatkan kelompok yang berbeda, dan melibatkan populasi yang berbeda. Dengan cara ini, penelitian dapat menemukan bukti-bukti yang saling melengkapi dan mengurangi dampak dari kemungkinan yang dapat terjadi dalam satu penelitian tunggal. Triangulasi juga menggabungkan informasi dari penelitian kuantitatif dan kualitatif, mempertimbangkan keandalan dan kepentingan pemrograman data, dan memanfaatkan keahlian para ahli (Bachri dalam Susanto, Risnita, & Jailani, 2023).

Norman K. Denkin dalam Susanto, Risnita, & Jailani (2023) Triangulasi didefinisikan sebagai penggabungan atau kombinasi berbagai metode yang digunakan untuk menyelidiki fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Hingga saat ini, konsep ini telah menjadi praktik umum di kalangan peneliti kualitatif di berbagai bidang. Menurut Denkin, triangulasi mencakup empat aspek, yaitu: (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar peneliti (jika penelitian dilakukan secara kelompok), (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori. Dalam rangka penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi dengan cara berikut:

a. Triangulasi metode

Metode triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi atau data menggunakan pendekatan yang berbeda. Dalam konteks penelitian kualitatif,

peneliti memanfaatkan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memastikan keakuratan informasi dan mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai suatu informasi, peneliti dapat menggunakan metode wawancara bebas atau terstruktur. Selain itu, peneliti juga dapat mengkombinasikan wawancara dengan observasi atau pengamatan untuk memverifikasi informasi. Pendekatan ini juga melibatkan penggunaan informan yang berbeda untuk menguji validitas informasi tersebut. Dengan melibatkan berbagai perspektif atau sudut pandang, diharapkan hasil yang diperoleh mendekati kebenaran. Triangulasi pada tahap ini menjadi relevan ketika kebenaran data atau informasi dari subjek atau informan penelitian menjadi diragukan. Oleh karena itu, jika data tersebut sudah jelas kebenarannya, misalnya dalam bentuk teks atau transkrip film, novel, dan sejenisnya, maka metode triangulasi mungkin tidak diperlukan (Alfansyur & Mariyani, 2020).

b. Triangulasi Sumber

Melalui teknik triangulasi sumber, periset berusaha membandingkan data hasil dari wawancara yang diperoleh dari setiap sumber atau informan sebagai bentuk perbandingan untuk mencari dan menggali kebenaran informasi yang telah didapatkan. Dengan kata lain, triangulasi sumber adalah cross check data dengan membandingkan fakta dari satu sumber dengan sumber yang lain (Alfansyur & Mariyani, 2020).

c. Triangulasi Teori

Para peneliti biasanya menghasilkan sebuah rumusan informasi atau pernyataan tesis sebagai hasil akhir dari penelitian kualitatif. Pernyataan tersebut kemudian dibandingkan dengan teori yang relevan guna menghindari pendapat

pribadi peneliti terhadap temuan atau kesimpulan yang telah didapatkan. Selain itu, dengan menggunakan triangulasi teori, pemahaman terhadap temuan juga dapat diperdalam apabila peneliti memiliki pengetahuan teoritis yang mendalam dalam menganalisis data yang telah diperoleh. Meskipun demikian, tahap ini diakui sebagai yang paling sulit karena peneliti diharapkan memiliki judgment ahli ketika membandingkan temuan dengan perspektif tertentu, terutama jika perbandingannya menunjukkan hasil yang signifikan berbeda (Rahardjo dalam Susanto, Risnita, & Jailani, 2023).

BAB II

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

1. Sejarah Balai KPH Yogyakarta

Balai KPH pada mulanya merupakan lembaga pemerintah dibawah Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Dimulai dengan dibangunnya Kawasan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta pada tahun 2006 dengan upaya perencanaan pembangunan KHP (Kawasan Hutan Produksi) di Provinsi DIY. Langkah ini diikuti dengan panduan untuk membentuk dan menetapkan resmi KPH Yogyakarta. Penetapan KPH Yogyakarta dilakukan oleh Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan No.SK.439/MENHUT-II/2007 tertanggal 13 Desember 2007, dengan wilayah hutan seluas 15.581 hektar.

Seiring berjalannya waktu perubahan demi perubahan struktur terjadi. Di tahun 2014 Badan Lingkungan Hidup dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY bergabung menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Daerah Istimewa Yogyakarta. Penggabungan serta pembentukan lembaga ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Kedua peraturan ini mewajibkan setiap pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintahan yang bukan termasuk dalam pelayanan dasar, termasuk pengelolaan lingkungan hidup, serta mengurus bidang kehutanan sebagai salah satu urusan pilihan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta didirikan pada tanggal 1 Januari 2019 sebagai respons terhadap perkembangan dinamis dan perubahan struktural dalam Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sejalan dengan ketentuan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1

Tahun 2018. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY pada periode setelah restrukturisasi kelembagaan adalah Ir. R. Sutarto, MP (2019-2020), yang menjabat selama dua tahun dan mulai masa bebas tugasnya pada tanggal 01 Oktober 2020. Antara November 2020 dan Februari 2021, posisi tersebut diisi oleh Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala, yaitu Ir. Hananto Hadi Purnomo, M.Sc. Kemudian, pada bulan Maret 2021, Dr. Ir. Kuncoro Cahyo Aji, M.Si. dilantik sebagai pejabat baru yang secara resmi menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY hingga saat ini.

Struktur kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY diatur oleh Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2018 yang telah mengalami perubahan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Dinas ini memiliki Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang strukturnya diatur oleh Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2018 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis pada Dinas LHK DIY. Dalam struktur organisasinya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY mengawasi 1 Sekretariat, 4 Bidang, 5 Balai, dan beberapa jabatan fungsional khusus. Setelah DLHK menjadi lembaga resmi pemerintah, sekarang Balai KLH menjadi salah satu Balai yang berada di bawah DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) DI Yogyakarta.

2. Visi dan Misi Balai KPH Yogyakarta

B.1 VISI

Visi pengelolaan hutan Kawasan Hutan Produksi (KPHP) Yogyakarta dirumuskan berdasarkan realitas kondisi hutan di Yogyakarta dengan memperhatikan berbagai aspek seperti ekologi, ekonomi, sosial budaya masyarakat Yogyakarta, serta karakteristik khusus Daerah Istimewa Yogyakarta. Visi ini juga mempertimbangkan berbagai kepentingan yang terkait dengan pengelolaan hutan. Sebagai hasil dari pertimbangan tersebut, berikut adalah visi pengelolaan hutan Kawasan Hutan Produksi Yogyakarta:

“Terwujudnya Pengelolaan Hutan yang Lestari, Maju, Berbudaya dan Berbasis Tata Nilai Kehidupan demi Kesejahteraan Masyarakat Yogyakarta”

B.2 MISI

Dalam rangka mewujudkan visi KPHP Yogyakarta seperti yang telah disebutkan di atas disusun misi pengelolaan hutan sebagai berikut:

1. Mewujudkan kepastian kawasan, jaminan berusaha, produktivitas, diversifikasi produk, dan keunggulan daya saing;
2. Mengembangkan inovasi dalam pengelolaan hutan dan hasil hutan melalui dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Menerapkan Multi Usaha Kehutanan berupa Pemanfaatan Kawasan, Usaha Pemanfaatan HHK, HHBK, dan/atau usaha pemanfaatan Jasa Lingkungan untuk mengoptimalkan kawasan hutan dan mendorong keterlibatan masyarakat demi kesejahteraan masyarakat;

4. Membangun hutan berdasarkan prinsip hutan lestari dengan mempertahankan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal setempat.

3. Kebijakan CSR Balai KPH Yogyakarta

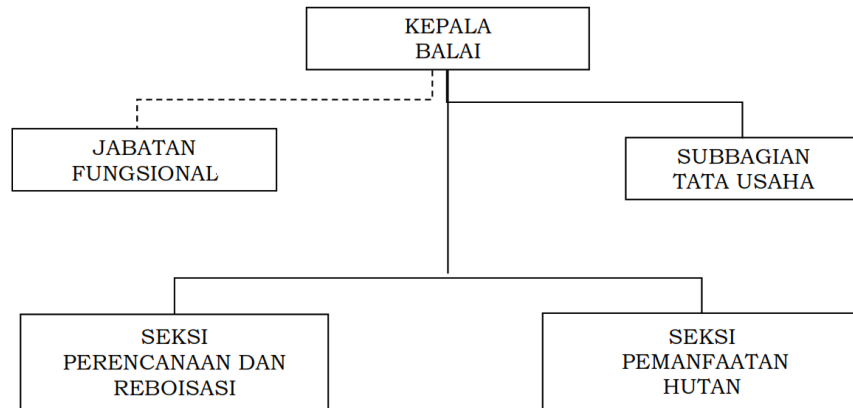
Berbicara mengenai kebijakan CSR, Balai KPH pada dasarnya tidak memiliki kebijakan mengenai CSR. Namun, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan program kerja Balai KPH memiliki kesamaan penerapan pada prinsip CSR. Kegiatan yang terbentuk dalam program kerja dari Balai KPH adalah pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung yang mengedepankan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial sesuai dengan visi misi Balai KLH. Adapun asas yang dijunjung Balai KPH Yogyakarta sesuai dengan PERDA DIY Nomor 7 tahun 2015 tentang pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung. Asas tersebut yakni manfaat, lestari, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, keterpaduan.

Melalui pabrik minyak kayu putih yang telah berdiri sejak tahun 1982, dan pengelolaan hutan kayu putih menjadi bentuk implementasi CSR Balai KPH Yogyakarta. Pabrik memiliki struktur organisasi tersendiri diluar Balai KPH Yogyakarta dan beberapa pekerja. Pabrik memiliki slogan yakni mewujudkan budaya K3 untuk menjamin stabilitas usaha dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Berikut adalah struktur organisasi, pegawai, dan pekerja pabrik penyulingan minyak kayu putih.

4. Struktur Organisasi Balai KPH Yogyakarta

Bagan 2

Struktur Organisasi Balai KPH Yogyakarta



Sumber: Dokumen Pengelolaan Kayu Putih Balai KPH Yogyakarta

Balai KPH Yogyakarta memiliki struktur organisasi yakni Kepala Balai, jabatan Fungsional, Subbagian tata usaha, seksi perencanaan dan reboisasi, dan Seksi Pemanfaatan Hutan. Masing masing dari seksi memiliki tugas pokok dan fungsi yakni :

a. Subbagian Tata Usaha

Tugas dari subbagian tata usaha adalah melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, keputakaan, penyusunan program dan laporan kinerja. Sedangkan fungsi seksi ini adalah penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha, penyusunan program kerja Balai, pengelolaan kearsipan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pendapatan, pengelolaan kepegawaian, pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, pelaksanaan kehumasan, pengelolaan keputakaan, pengelolaan data, pelayanan

informasi, dan pengembangan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT

b. Seksi Perencanaan dan Reboisasi Hutan

Tugas dari seksi perencanaan dan reboisasi hutan adalah Menyelenggarakan teknis operasional perencanaan dan reboisasi hutan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan. Sedangkan terdapat beberapa fungsi seksi perencanaan hutan dan reboisasi yakni penyusunan program kerja, pelaksanaan inventarisasi potensi hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, penyiapan bahan pengesahan rencana kerja pemegang izin, penyiapan teknis operasional kerja sama pemanfaatan hutan, pengamanan dan perlindungan hutan, pemeliharaan dan pengawasan tanda batas hutan, penyiapan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman hutan, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Perencanaan dan Reboisasi, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT

c. Seksi Pemanfaatan Hutan

Tugas dari seksi pemanfaatan Hutan adalah Menyelenggarakan teknis operasional pemanfaatan hutan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan. Sementara fungsi seksi pemanfaatan hutan ialah penyusunan program kerja, pemanfaatan kawasan hutan secara lestari, pemungutan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, pengolahan hasil hutan kayu dan bukan kayu, penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil hutan kayu dan bukan kayu, penyelenggaraan penatausahaan hasil hutan, penyelenggaraan promosi

dan pemasaran hasil hutan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pemanfaatan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

5. Tugas dan Fungsi Balai KPH Yogyakarta

E.1 Tugas

Menyelenggarakan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung untuk meningkatkan rasio pemanfaatan sumber daya hutan.

E.2 Fungsi

Fungsi dari Balai KPH yakni:

- a. penyusunan program kerja Balai
- b. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Balai
- c. pelaksanaan perencanaan, reboisasi, pengamanan dan perlindungan hutan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan
- d. pelaksanaan pemanfaatan hutan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan
- e. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT

6. Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Balai KPH Yogyakarta

Pengelolaan hutan ini diatur dalam PERDA DIY Nomor 7 tahun 2015 tentang pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung. Selain itu, pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung berdasarkan 6 asas yaitu manfaat, lestari, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, keterpaduan. Adapun maksud dari dikelolanya hutan yakni untuk

memperoleh manfaat untuk kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial demi mencapai beberapa tujuan ialah:

- a. Menjamin kelestarian
- b. Mencegah kerusakan
- c. Memelihara/melestarikan biodiversitas
- d. Mewujudkan tata kelola yang profesional, sinergis, dan partisipatif
- e. Menjamin pemanfaatan hutan secara optimal
- f. Menjamin hak dan kewajiban negara dan masyarakat dalam pengelolaan hutan

Untuk merealisasikan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung KPH melakukan beberapa hal yakni pemanfaatan dalam bentuk swakelola, kerjasama, dan perizinan. Swakelola dilakukan untuk mengelola hutan dengan hasil minyak kayu putih dan kayu. Untuk mengelola minyak kayu putih, Balai KPH Yogyakarta mendirikan beberapa pabrik penyulingan minyak kayu putih, salah satunya yang berada di Gelaran. Berikut merupakan tabel sebaran minyak kayu putih yang dikelola oleh Balai KPH Yogyakarta. Selain itu, kerjasama juga dilakukan KPH dengan BUMDES, Koperasi, dan PT. Kemudian, Perizinan yang dimaksud adalah KPH memberikan izin dalam bentuk HKM kepada 42 kelompok yang sering disebut kelompok Pesanggem ataupun HTR kepada 3 koperasi.

Tabel 3

Sebaran Minyak Kayu Putih yang dikelola Oleh Balai KPH Yogyakarta

NO	BDH	RPH
1	Playen	Kemuning Wonolagi Gubugrubuh Menggoran Kepek
2	Paliyan	Grogol
3	Panggung	Pucanganom
4	Karangmojo	Nglipar Gelaran Kenet Candi

Sumber: Dokumen Pengelolaan Kayu Putih Balai KPH Yogyakarta

7. KEGIATAN PEMBERDAYAAN BALAI KPH YOGYAKARTA

Berikut merupakan bentuk kerjasama Balai KPH Yogyakarta dalam rangka pemberdayaan untuk masyarakat :

Tabel 4

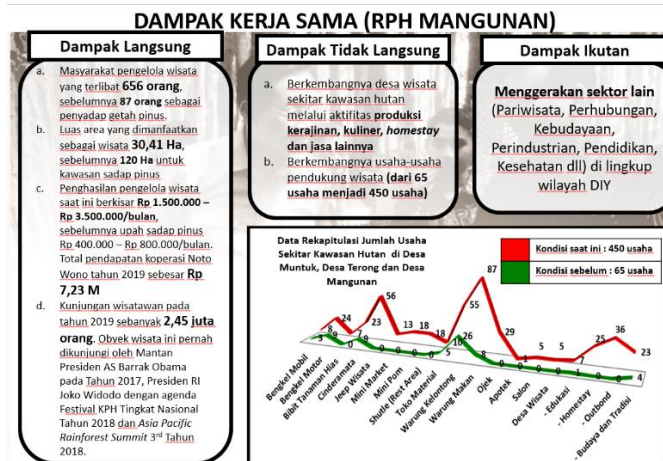
Kegiatan Pemberdayaan yang Dilakukan Oleh Balai KPH Yogyakarta

NO.	NAMA KEGIATAN
1.	Pengelolaan lahan tegaan Kayu Putih bersama Pesanggem
2.	Pembukaan lapangan pekerjaan di Pabrik Pengolahan Minyak Kayu Putih
3.	Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Kawasan Mangunan
4.	Kolaborasi UMKM binaan koperasi
5.	Pengelolaan wisata bersama BUMDES

Selain tabel nama-nama pemberdayaan, adapula dampak kerja sama yang dilakukan Balai KPH Yogyakarta dengan mitra kerja selain di pengelolaan Kayu Putih. Data tersebut dapat disajikan sebagai berikut :

Gambar 2

Dampak Kerjasama KPH Yogyakarta selain Pohon Kayu Putih



Sumber : Dokumen Pengelolaan HP dan HL Balai KPH Yogyakarta

Adapun pemanfaatan sumber daya hutan berupa Jasa Lingkungan oleh Balai KPH Yogyakarta. Kerja sama pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam dilakukan pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung. Bentuk kerjasama tersebut dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar 3

Pemanfaatan Sumber Daya Hutan sebagai Jasa Lingkungan



Sumber : Dokumen Pengelolaan HP dan HL Balai KPH Yogyakarta

8. PROFIL PABRIK PENGOLAHAN MINYAK KAYU PUTIH

Pabrik minyak kayu putih merupakan bentuk swakelola Balai KPH Yogyakarta. Pabrik bertempat di Padukuhan Sokoliman II, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul, DIY. Dalam pengelolaan pabrik terdapat 5 karyawan dan 30 pekerja lepas. Pabrik memiliki sistem kerja berkelompok dalam proses produksi minyak kayu putih. Dalam prosesnya, membutuhkan waktu 6 jam untuk sekali produksi sehingga dalam sehari dapat 4 kali produksi. Mayoritas pekerja yang bekerja di pabrik merupakan masyarakat sekitar pabrik. Pabrik mulai beroperasi sejak tahun 1982.

Bagan 3

Bagan Struktur Organisasi Pabrik Pengolahan Minyak Kayu Putih



Sumber: Dokumentasi Pabrik Penyulingan Minyak Kayu Putih

Berikut merupakan keterangan dari bagan struktur organisasi pabrik pengolahan minyak kayu putih:

Tabel 5

Tabel Pengelola Pabrik dan Tenaga Kerja Pengolahan Minyak Kayu Putih 2023

No.	JABATAN	NAMA
1.	Kepala Pabrik	IG. Suranta
2.	Pengadministrasian Pabrik	Ant. Didik Arwanto
3.	Koordinator Memasak Daun Kayu Putih	Wagiman
4.	Koordinator Pengapian	Puryanto
5.	Koordinator Briket Tenaga Kerja Tenaga Kerja Tenaga Kerja Tenaga Kerja Tenaga Kerja	Tuparmino Heru Susanto Amin Rukinah Hamet Bowo
6.	Koordinator Penimbangan Tenaga Kerja Tenaga Kerja Tenaga Kerja Tenaga Kerja Tenaga Kerja	Joko Riyanto Sri Sumanto Aris Edi Susanto Dedi Ariwibowo Jamaludin
7.	Koordinator Penakaran Minyak Tenaga Kerja Tenaga Kerja	- Dono/Peno Andi

umen Pabrik Pengolahan Minyak Kayu Putih

Pengelola Pabrik dan pekerja pabrik merupakan masyarakat di sekitar pabrik. Mereka berpartisipasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan kayu putih. Pengelola pabrik merupakan pegawai tetap. Sedangkan pekerja pabrik merupakan pekerja lepas. Mereka bekerja dengan melakukan tugas-tugas yang sudah diatur, seperti menjalankan mesin, memeriksa kualitas produk, dan mematuhi aturan keselamatan. Pekerja pabrik sering bekerja dalam tim untuk mencapai produksi yang efisien.

pembahasan CSR dalam perusahaan ataupun CSR yang dilakukan oleh HUMAS, sedangkan penelitian ini memiliki fokus pada bentuk implementasi CSR pemerintah yang berbasis pada regulasi. Selain itu, penelitian ini mencoba untuk menghubungkan antara strategi komunikasi pemberdayaan dengan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi dan peluang yang ada di sekitarnya. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki dan cara mengoptimalkannya.

Dengan demikian, strategi komunikasi pemberdayaan berperan sebagai alat yang penting dalam mendukung proses pemberdayaan dan pada akhirnya dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menyempurnakan penelitian ini, penelitian selanjutnya diharap dapat melengkapi data yang perlu disempurnakan. Masih terdapat beberapa informasi yang perlu digali lebih dalam yakni mengenai hubungan komunikasi yang terbangun antara Balai KPH Yogyakarta, Pabrik Pengolahan Kayu putih dengan Masyarakat dan seberapa efektif upaya Balai KPH Yogyakarta dalam pengembangan potensi daerah yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Balai KPH Yogyakarta tidak memiliki kebijakan ataupun program CSR khusus namun implementasinya tetap relevan. Hal tersebut dikarenakan pabrik milik pemerintah, sama seperti perusahaan swasta, memiliki tanggung jawab sosial

terhadap masyarakat di sekitarnya. Melalui CSR, pabrik dapat berkontribusi positif pada pemberdayaan masyarakat, lingkungan, dan kesejahteraan umum. Bentuk penerapan CSR pemerintahan hanya dapat berpatokan pada regulasi.

2. Strategi komunikasi pemberdayaan Balai KPH Yogyakarta melalui implementasi CSR untuk mensejahterakan masyarakat yakni (1) Membangun relasi dengan masyarakat (2) Membuat regulasi atau kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung, (3) Membuat rencana dan program kerja, (4) Mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat (5) Pemanfaatan media sosial dan teknologi, (6) Membangun kemitraan, dan (7) Melakukan evaluasi kerja. Hasil dari penerapan strategi komunikasi pemberdayaan tersebut cukup efektif namun masyarakat masih bergantung pada regulasi yang sewaktu-waktu dapat berubah.
3. Strategi komunikasi pemberdayaan memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif berupa kesempatan untuk ikut mengelola dan merasakan manfaat Hutan Produksi dengan menanam pohon kayu putih oleh masyarakat, pendirian pabrik minyak kayu putih sehingga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, pengelolaan lahan di sekitar pohon minyak kayu putih untuk menambah pemasukan PAD. Dampak negatif hampir tidak ada dikarenakan limbah pabrik merupakan limbah tidak berbahaya sehingga tidak berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.
4. Hubungan komunikasi yang berjalan antara Balai KPH Yogyakarta dengan pabrik pengolahan minyak kayu putih atau sebaliknya cukup harmonis. Namun hubungan komunikasi antara pengelola pabrik dengan pekerja mengalami kendala dalam mengungkapkan pendapat atau masih terdapat *gab*. Sedangkan hubungan Balai KPH Yogyakarta dan pabrik, dengan masyarakat selama ini belum terdapat kendala.

5. Peningkatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat telah dirasakan namun tidak secara signifikan. Kesejahteraan masyarakat tetap tercapai namun perlu adanya pengembangan program pemberdayaan agar masyarakat dapat sepenuhnya mandiri.

B. SARAN

B.1 Balai KPH Yogyakarta

1. Melakukan evaluasi program lebih mendalam agar makna pemberdayaan masyarakat yang sebenarnya dapat terwujud.
2. Memperbaiki hubungan komunikasi antara pengelola pabrik dengan pekerja sehingga *gab* komunikasi dapat dihilangkan.
3. Membuat program pengembangan masyarakat untuk meningkatkan kemandirian masyarakat.

B.2 Peneliti Selanjutnya

1. Penelitian selanjutnya diharap dapat melengkapi data yang perlu disempurnakan. Masih terdapat beberapa informasi yang perlu digali lebih dalam yakni mengenai hubungan komunikasi yang terbangun antara Balai KPH Yogyakarta, Pabrik Pengolahan Kayu putih dengan Masyarakat dan seberapa efektif upaya Balai KPH Yogyakarta dalam pengembangan potensi daerah yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulhak, I., & Anwas, O. M. (2019). MODEL KONVERGENSI DALAM KOMUNIKASI PEMBELAJARAN. *Jurnal Teknodik*, XII(14), 050-072.
- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020, Desember). Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi, Teknik, Sumber dan Waktu pada Penelitian pendidikan Sosial. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, V(2), 146-150.
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. (2023, Juli). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal Pendidikan Islam*, I(2), 1-9.
- Budiati, I., Riyadi, Larasaty, P., Pratiwi, A. I., Saputra, V. G., Meilaningsih, T., . . . Hartini, S. (2020). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2020*. Jakarta: BPS RI.
- Firmansyah, H. (2012, Juli). Ketercapaian Indikator Keberdayaan Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) di Kota Banjarmasin. *Jurnal Agribisnis Perdesaan*, II(2), 172-180.
- Fithriyana, E. (2020). Pengolahan Produk Berbahan Dasar Buah Pepaya Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, I(2), 1-9.
- Habib, M. A. (2021). Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif. *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, I(2), 82-110.
- Hafied, C. (2017). *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lenaini, I. (2021, Juni). Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling. *Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Sejarah*, VI(1), 33-39.

- Lestari, L., Hairunnisa, & Boer, K. M. (2018). Strategi Komunikasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Pt.Inhutani di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. *eJurnal Ilmu Komunikasi*, 308-320.
- Muhtar, S. M., Cangara, H., & Unde, A. A. (2013, Maret). Strategi Komunikasi dalam Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR). *Jurnal Komunikasi KAREBA*, II(1), 1-10.
- Nayenggita, G. B., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2019, Juli). Praktik Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, II(1), 61-66.
- Nihayah, U., & Inayah, R. (2022). Strategi Komunikasi Penyuluhan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial pada Masyarakat. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, X(2).
- Octaviani, F., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2022, Maret). Strategi Komunikasi dalam Corporate Social Responsibility Perusahaan sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Kesehatan "Humanitas"*, IV, 21-33.
- Parida, J., & Setiamandani, E. D. (2019). Pengaruh Strategi Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, VIII(2), 146-152.
- Rasyid, A., Saleh, A., Cangara, H., & Priyatna, W. B. (2015). Komunikasi dalam CSR Perusahaan: Pemberdayaan Masyarakat dan Membangun Citra Positif. *MIMBAR*, 507-518.
- Retnaningsih, H. (2015, Desember). Permasalahan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat. *Aspirasi*, 6, 177-188.
- Saleh, A., & Sihite, M. (2020). Strategi Komunikasi untuk Program Corporate Social Responsibility dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Komunikasi Pemberdayaan*, 98-105.
- Setyowati, Y. (2019, Juli). Komunikasi Pemberdayaan sebagai Perspektif Baru Pengembangan Pendidikan Komunikasi Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, XVII, 188-199.

- Storyteller. (2023, 10 12). *5 Contoh Penerapan CSR di Perusahaan Terkenal di Indonesia*. Diambil kembali dari Stories Briefer: <https://stories.briefer.id/2023/10/12/contoh-penerapan-csr-di-perusahaan/>
- Sudana, I. m., & Arlindana, P. A. (2011). Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Go-Public di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*, 37-49.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, D. .: (2017, November). Pengaruh Media Komunikasi Smartphon Terhadap Interaksi Sosial Pelajar. *Jurnal Paradigma Madani*, IV(2), 64-74.
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. (2023, Mei). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Penelitian Ilmiah. *QOSIM (Jurnal Pendidikan, Sosial, & Hukum)*, I(1), 53-61.
- Suyatna, H. (2012). *CSR Komitmen untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Azzagrafika.
- Syahputri, A. Z., Fallenia, F. D., & Syafitri, R. (2023, Juni 30). Kerangka Berfikir Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, II(1), 161-166.
- Tegar, M. (2019). Strategi Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kelompok Usaha Dapur Pesisir Oleh Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Kepulauan Meranti). *JOM FISIP*, VI, 1-15.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Field Note (Catatan Lapangan)

1. A. Identitas Informan

Nama	: Bapak Antonius Didik Arwanto
Pekerjaan	: Administrasi Pabrik Pengolahan Minyak Kayu Putih
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Usia	: 51 Tahun
Hari/ Tanggal	: Rabu, 15 November 2023
Lama Wawancara	: 10 Menit

B. Informasi yang ditanyakan :

1. Bagaimana profil singkat pabrik pengolahan kayu putih?
2. Adakah program kerja ataupun kebijakan CSR Pabrik Pengolahan Kayu Putih?
3. Bagaimana bentuk pemberdayaan yang dilakukan pabrik?
4. Bagaimana kondisi pabrik saat ini?

C. Hasil Wawancara

Pabrik pengelolaan minyak kayu putih merupakan bagian dari Balai KPH Yogyakarta bukan merupakan perusahaan yang berdiri sendiri. Pabrik memiliki pegawai dan pekerja kurang lebih 30 orang. Seluruh aktivitas pabrik diawasi oleh Balai KPH Yogyakarta. dengan kata lain pabrik hanya menjalankan perintah dan regulasi dari Balai KPH Yogyakarta. karena seluruh aktivitas pabrik diatur oleh Balai, maka pabrik tidak memiliki kebijakan CSR atau wewenang untuk membuat program kerja CSR. Tidak adanya program CSR juga dikarenakan tidak adanya anggaran yang memang dikhususkan untuk pembuatan program CSR.

Masyarakat di sekitar Balai merupakan masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani. Untuk itu, bentuk pemberdayaan pabrik dengan melibatkan

masyarakat menjadi pekerja dan mengelola lahan tegaan kayu putih. selain itu pekerja pabrik rata-rata masyarakat sekitar. Pabrik terlihat tidak ada aktivitas pengelolaan minyak kayu putih Kondisi pabrik sedang tidak berproduksi dikarenakan sedang terjadi kendala pemasaran.

2. A. Identitas Informan

Nama : Bapak Supriyono
Pekerjaan : Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Usia : 55 Tahun
Hari/Tanggal : Senin, 18 Desember 2023
Lama Wawancara : 15 Menit

B. Informasi yang ditanyakan

1. Apa yang menjadi fokus Balai KPH Yogyakarta?
2. Bagaimana posisi pabrik terhadap Balai KPH Yogyakarta?
3. Bagaimana kondisi pabrik sekarang?

C. Hasil Wawancara

Balai KPH Yogyakarta merupakan unit pemerintahan dibawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Balai memiliki fokus dalam seluk-beluk perhutanan di wilayah Yogyakarta. Seksi yang bersangkutan langsung oleh pabrik merupakan seksi perencanaan hutan yang mana tugasnya adalah merancang perencanaan dan pemanfaatan hutan.

Jika dilihat posisi pabrik terhadap Balai, pabrik merupakan bentuk swakelola hutan yan dilakukan oleh Balai KPH Yogyakarta. Program kerja yang dilakukan oleh pabrik dibentuk sepenuhnya dan dilaporkan kepada Balai. Regulasi yang mengikat pabrik membuat pabrik tidak memiliki wewenang untuk membuat program kerja sendiri.

Dalam jangka waktu terdekat, awalnya proses produksi minyak kayu putih terlihat tidak menemukan persoalan. Namun, pada saat proses lelang berlangsung terjadi kendala yakni harga lelang yang dibawah standar yang telah ditentukan. Proses lelang yang gagal berdampak pada proses produksi pabrik sehingga dihentikan untuk sementara waktu.

3. A. Identitas Informan

Nama	: Bapak Supriyono
Pekerjaan	: Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Usia	: 55 Tahun
Hari/Tanggal	: Rabu, 20 Desember 2023
Lama Wawancara	: 30 Menit

B. Informasi yang ditanyakan

1. Bagaimana sejarah Balai KPH Yogyakarta?
2. Apa tugas masing masing seksi yang ada di Balai KPH Yogyakarta?
3. Bagaimana alur pengelolaan hutan?
4. Bagaimana kebijakan CSR yang ada di Balai KPH Yogyakarta?
5. Adakah program CSR yang dilakukan Balai KPH Yogyakarta?
6. Bagaimana proses pelaporan dampak lingkungan yang dilakukan oleh Balai KPH Yogyakarta?
7. Bagaimana dampak yang dirasakan masyarakat terkait proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Balai?
8. Sejauh ini, apakah terdapat komplain dari masyarakat terhadap proses pengelolaan minyak kayu putih?
9. Apakah Balai memiliki kunjungan terjadwal ke pabrik?
10. Bagaimana hubungan komunikasi yang terjalin antara Balai, pabrik dengan masyarakat sekitar pabrik?

C. Hasil Wawancara

Balai KPH pada mulanya merupakan lembaga pemerintah dibawah Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Dimulai dengan dibangunnya Kawasan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta pada tahun 2006 dengan upaya perencanaan pembangunan KHP (Kawasan Hutan Produksi) di Provinsi DIY. Langkah ini diikuti dengan panduan untuk membentuk dan menetapkan resmi KPH Yogyakarta. Penetapan KPH Yogyakarta dilakukan oleh Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan No.SK.439/MENHUT-II/2007 tertanggal 13 Desember 2007, dengan wilayah hutan seluas 15.581 hektar.

Seiring berjalannya waktu perubahan demi perubahan struktur terjadi. Di tahun 2014 Badan Lingkungan Hidup dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY bergabung menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Daerah Istimewa Yogyakarta. Penggabungan serta pembentukan lembaga ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Kedua peraturan ini mewajibkan setiap pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintahan yang bukan termasuk dalam pelayanan dasar, termasuk pengelolaan lingkungan hidup, serta mengurus bidang kehutanan sebagai salah satu urusan pilihan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta didirikan pada tanggal 1 Januari 2019 sebagai respons terhadap perkembangan dinamis dan perubahan struktural dalam Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sejalan dengan ketentuan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY pada periode setelah restrukturisasi kelembagaan adalah Ir. R.Sutarto, MP (2019-2020), yang menjabat selama dua tahun dan mulai masa bebas tugasnya pada tanggal 01 Oktober 2020. Antara November 2020 dan Februari 2021, posisi tersebut diisi oleh Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala, yaitu Ir. Hananto Hadi Purnomo, M.Sc. Kemudian, pada bulan Maret 2021, Dr. Ir. Kuncoro Cahyo Aji, M.Si. dilantik sebagai pejabat baru yang secara resmi menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY hingga saat ini.

Struktur kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY diatur oleh Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2018 yang telah mengalami perubahan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Dinas ini memiliki Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang strukturnya diatur oleh Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2018 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis pada Dinas LHK DIY. Dalam struktur organisasinya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY mengawasi 1 Sekretariat, 4 Bidang, 5 Balai, dan beberapa jabatan fungsional khusus. Setelah DLHK menjadi lembaga resmi pemerintah, sekarang Balai KLH menjadi salah satu Balai yang berada di bawah DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) DI Yogyakarta.

Balai KPH Yogyakarta memiliki struktur organisasi yakni Kepala Balai, jabatan Fungsional, Subbagian tata usaha, seksi perencanaan dan reboisasi, dan Seksi Pemanfaatan Hutan. Masing masing dari seksi memiliki tugas pokok dan fungsi yakni:

a. Subbagian Tata Usaha

Tugas dari subbagian tata usaha adalah melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, keputakaan, penyusunan program dan laporan kinerja. Sedangkan fungsi seksi ini adalah penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha, penyusunan program kerja Balai, pengelolaan kearsipan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pendapatan, pengelolaan kepegawaian, pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, pelaksanaan kehumasan, pengelolaan keputakaan, pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT

b. Seksi Perencanaan dan Reboisasi Hutan

Tugas dari seksi perencanaan dan reboisasi hutan adalah Menyelenggarakan teknis operasional perencanaan dan reboisasi hutan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan. Sedangkan terdapat beberapa fungsi seksi perencanaan hutan dan reboisasi yakni penyusunan program kerja, pelaksanaan inventarisasi potensi hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, penyiapan bahan pengesahan rencana kerja pemegang izin, penyiapan teknis operasional kerja sama pemanfaatan hutan, pengamanan dan perlindungan hutan, pemeliharaan dan pengawasan tanda batas hutan, penyiapan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman hutan, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Perencanaan dan Reboisasi, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT

c. Seksi Pemanfaatan Hutan

Tugas dari seksi pemanfaatan Hutan adalah Menyelenggarakan teknis operasional pemanfaatan hutan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan. Sementara fungsi seksi pemanfaatan hutan ialah penyusunan program kerja, pemanfaatan kawasan hutan secara lestari, pemungutan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, pengolahan hasil hutan kayu dan bukan kayu, penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil hutan kayu dan bukan kayu, penyelenggaraan penatausahaan hasil hutan, penyelenggaraan promosi dan pemasaran hasil hutan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pemanfaatan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Berbicara mengenai kebijakan CSR, Balai KPH sendiri pada dasarnya tidak memiliki kebijakan mengenai CSR. Namun, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan program kerja Balai KPH memiliki kesamaan penerapan pada prinsip CSR. Kegiatan yang terbentuk dalam program kerja dari Balai KPH adalah pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung yang mengedepankan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial sesuai dengan visi misi Balai KPH. Adapun asas yang dijunjung Balai KPH Yogyakarta sesuai dengan PERDA DIY Nomor 7 tahun 2015 tentang pengelolaan

hutan produksi dan hutan lindung. Asas tersebut yakni manfaat, lestari, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, keterpaduan.

Melalui pabrik minyak kayu putih yang telah berdiri sejak tahun 1982, dan pengelolaan hutan kayu putih menjadi bentuk implementasi CSR Balai KPH Yogyakarta. Pabrik memiliki struktur organisasi tersendiri diluar Balai KPH Yogyakarta dan beberapa pekerja. Pabrik memiliki slogan yakni mewujudkan budaya K3 untuk menjamin stabilitas usaha dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Berikut adalah struktur organisasi, pegawai, dan pekerja pabrik penyulingan minyak kayu putih.

Balai KPH Yogyakarta juga memiliki sistem informasi untuk pelaporan hasil hutan pada website yang diberi nama SIPUH (Sistem Informasi Penataan Usaha Hasil Hutan). Website ini sangat berguna untuk merekap seluruh data mengenai pengolahan hutan salah satunya hutan kayu putih.

Harapan Balai KPH Yogyakarta dari penerapan program tersebut adalah adanya keterlibatan masyarakat di sekitar pabrik pengolahan minyak kayu putih untuk mengembangkan potensinya salah satunya adalah potensi kayu putih. Dengan pengembangan potensi tersebut harapan lebih lanjut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Kebijakan mempekerjakan masyarakat telah ada sejak pabrik berdiri yakni tahun 1982, sedangkan kebijakan mengizinkan masyarakat untuk ikut mengelola tegakan kayu putih sejak 1970.

Dengan penerapan program kerja tersebut, tentu memiliki dampak bagi masyarakat. Dampak tersebut dapat berupa dampak positif dan negatif. Dampak negatif lebih pada dampak lingkungan namun dampak lingkungan berupa pencemaran yang disebabkan oleh pengolahan minyak kayu putih sangat kecil dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Sebagai langkah pencegahan, Balai KPH Yogyakarta melakukan pengendalian pencemaran dengan mengeluarkan surat UKL-UPL. Hal tersebut merupakan bentuk kepedulian Balai dalam menjaga lingkungan dan memastikan lingkungan tetap lestari.pabrik juga memiliki kunjungan terjadwal setahun untuk peninjauan pabrik.

4. A. Identitas Informan

Nama : Bapak Suranta
Pekerjaan : Kepala Pabrik Penyulingan Minyak Kayu Putih
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Usia : 54 Tahun

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Desember 2023
Lama Wawancara : 30 menit

B. Informasi yang ditanyakan

1. Bagaimana sistem kerja pabrik?
2. Bagaimana struktur organisasi pabrik?
3. Apakah terdapat komplain berkaitan dengan upah pekerja?
4. Bagaimana proses pengelolaan limbah di pabrik?
5. Adakah dampak yang dihasilkan dari pabrik?
6. Berapa kali pihak Balai melakukan kunjungan ke pabrik?

C. Hasil Wawancara :

Pabrik Minyak Kayu Putih merupakan pabrik milik pemerintah yang memiliki sistem kerja borongan yakni merekrut masyarakat dalam bentuk kelompok-kelompok dan diberikan upah sesuai dengan perjanjian dari pabrik. Pabrik tersebut berbeda dengan PT atau semacamnya dengan sistem kerja yang telah lama diterapkan pabrik.

Pekerja pabrik diupah secara berkelompok. Dilihat dari besarnya upah yang diberikan sudah memenuhi upah minimum daerah. Di Gunungkidul Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar Rp2.188.041. Rata-rata pekerja mendapatkan upah sesuai dengan UMK. Dari UMK tersebut dirasa cukup dan sesuai dengan standar yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Sejauh ini, pekerja tidak pernah melakukan komplain kepada pihak pabrik.

Kemudian, pihak pabrik pengolahan minyak kayu putih tidak menghalangi masyarakat yang ingin bekerja di pabrik. Selagi memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, maka pihak pabrik mempersilakannya. Bahkan masyarakat yang tidak

berpengalaman diperbolehkan untuk melamar. Syarat yang ditentukan tersebut tidak memberatkan masyarakat yang ingin menjadi pekerja di pabrik. Kekuatan fisik dan tanggung jawab menjadi kunci jika ingin menjadi tenaga kerja pabrik.

Pabrik memiliki slogan yakni mewujudkan budaya K3 untuk menjamin stabilitas usaha dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. struktur organisasi tajni terdapat 5 pegawai tetap, dan 30 pekerja pabrik penyulingan minyak kayu putih.

Pengolahan kayu putih yang dilakukan oleh Balai KPH tidak serta merta hanya melibatkan masyarakat atas dasar sukarela sebagai pekerja namun masyarakat diberikan upah. Besar upah tersebut telah ditentukan oleh Balai KPH Yogyakarta. Balai melakukan inspeksi 2 sampai 3 kali ke pabrik dalam bentuk inspeksi.

5. A. Identitas Informan

Nama	: Bapak Wawan Nugrogo
Pekerjaan	: Pekerja Pabrik
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Usia	: 35 Tahun
Hari/Tanggal	:Sabtu, 20 Januari 2024
Lama Wawancara	: Fleksibel via WhatsApp

B. Informasi yang ditanyakan

1. Berapa lama bekerja di pabrik?
2. Sebagai pekerja pabrik bagian apa?
3. Berapa lama waktu kerja?
4. Berapa upah yang diberikan oleh pabrik?
5. Bagaimana tanggapan mengenai upah yang diberikan oleh pabrik?
6. Adakah hambatan selama pekerja di pabrik?
7. Bagaimana hubungan komunikasi yang terjalin selama ini?
8. Apakah ada perubahan ekonomi selama menjadi pekerja?

C. Hasil Wawancara

Pekerja telah bekerja di pabrik sejak tahun 2006. Selama 17 tahun sebagai pekerja beliau tidak hanya ditempatkan dalam satu bidang. Awalnya beliau di bagian pengangkutan daun, kemudian menjadi penimbang daun, dan terakhir ditempatkan di bagian produksi.

Dalam sekali proses produksi dapat memakan waktu 6 jam. Dengan demikian, dalam sehari pabrik dapat melakukan 4 kali proses produksi. Proses tersebut dilakukan selama 24 jam penuh. Upah kerja selama produksi dalam sebulan sekitar 2 juta rupiah. Terkait upah tersebut, pekerja merasa kurang dengan upah yang didapat dikarenakan beban kerja yang sangat berat.

Hambatan dalam proses kerja adalah ketika perpindahan bagian kerja, perlu ada penyesuaian kembali. Hambatan lain dirasakan ketika pabrik tidak berproduksi, hal ini menyebabkan pekerja menganggur dan tidak memiliki pemasukan. Untuk itu, selama menjadi pekerja, beliau beranggapan bahwa tidak ada peningkatan yang signifikan dalam hal ekonomi.

6. A. Identitas Informan

Nama	: Bapak Waryadi
Pekerjaan	: Kepala dukuh Sokoliman II
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Usia	: 40 Tahun
Hari/Tanggal	: Selasa, 16 Januari 2024
Lama Wawancara	: 15 menit

B. Informasi yang ditanyakan

1. Sejauh mana Kepala Dusun mengetahui seluk beluk pabrik?
2. Bagaimana tanggapan mengenai adanya pabrik?
3. Apa dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya pabrik?
4. Adakah komplain dari masyarakat terkait limbah yang ditimbulkan pabrik?

C. Hasil Wawancara

Sebagai kepala dusun Sokoliman II beliau sebatas mengerti pabrik secara umum. Pabrik merupakan bawahan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Selama menjadi dukuh, beliau tidak pernah menerima komplain dari masyarakat terkait limbah ataupun yang lainnya. Pabrik berdiri sejak tahun 1982 dan sudah mengalami banyak perkembangan.

Menurut keterangan beliau, banyak dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pabrik. Masyarakat mayoritas bekerja sebagai petani yang mengolah lahan tegaan dari dinas. Terdapat pula masyarakat yang mayoritas laki-laki bekerja di pabrik.

7. A. Identitas Informan

Nama	: Ibu Sanem
Pekerjaan	: masyarakat (Kelompok Pesanggem)
Jenis Kelamin	: Perempuan
Usia	: 72 Tahun
Hari/Tanggal	: Selasa, 16 Januari 2024
Lama Wawancara	: 15 menit

B. Informasi yang ditanyakan

1. Bagaimana manfaat yang dirasakan masyarakat dari keberadaan pabrik?
2. Apakah terdapat keluhan dengan adanya pabrik pengolahan minyak kayu putih?
3. Telah mengolah lahan tegaan berapa lama?
4. Bagaimana hubungan komunikasi pengelola pabrik dan masyarakat?

C. Hasil Wawancara

Masyarakat selain pekerja pabrik juga diberikan izin untuk mengelola tanaman selain minyak kayu putih sebagai penghasilan tambahan. Beliau menanam jagung, padi, kacang tanah dan palawija. Melalui kebijakan tersebut masyarakat dapat merasakan dampak lebih besar yakni kestabilan ekonomi.

informan merasa sangat berterimakasih dengan diizinkan mereka untuk ikut andil dalam pengelolaan lahan dan menjadikan lahan tersebut sumber mata

pencaharian. Manfaat yang besar telah Balai KPH Yogyakarta berikan untuk masyarakat. Beliau mengelola tanaman sejak beliau masih remaja. Hubungan komunikasi antar pegawai pabrik dan masyarakat tidak terdapat masalah.

8. A Identitas Informan

Nama : Ibu Fatimah
Pekerjaan : Masyarakat (Kelompok Pesanggem)
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 29 Tahun
Hari/Tanggal : Selasa, 16 Januari 2024
Lama Wawancara : 15 menit

A. Informasi yang ditanyakan

1. Bagaimana manfaat yang dirasakan masyarakat dari keberadaan pabrik?
2. Apakah terdapat keluhan dengan adanya pabrik pengolahan minyak kayu putih?
3. Telah mengolah lahan tegakan berapa lama?
4. Bagaimana hubungan komunikasi pengelola pabrik dan masyarakat?

B. Hasil Wawancara

Masyarakat selain pekerja pabrik juga diberikan izin untuk mengelola tanaman selain minyak kayu putih sebagai penghasilan tambahan. Beliau menanam Tanaman tumpangsari jagung dan kacang tanah. Melalui kebijakan tersebut beliau berterimakasih kepada Balai karena dapat merasakan dampak lebih besar yakni kestabilan ekonomi.

informan merasa senang dan terbantu dari diizinkan mereka untuk ikut andil dalam pengelolaan lahan dan menjadikan lahan tersebut sumber mata pencaharian. Beliau mengelola tanaman sejak beliau berumur 12 tahun bersama

orang tuanya. Hubungan komunikasi antar pegawai pabrik dan masyarakat pun tidak terdapat masalah.

Lampiran 2 Dokumentasi

1. Proses Pengolahan Minyak Kayu Putih



2. Wawancara dengan Kepala Pabrik Penyulingan Minyak Kayu Putih



3. Wawancara dengan Balai Kepala Seksi Perencanaan Hutan



4. Wawancara dengan Kepala Dukuh Sokoliman II



5. Wawancara dengan Kelompok Pesanggem



6. Kegiatan Pemberdayaan yang dilakukan Balai KPH Yogyakarta

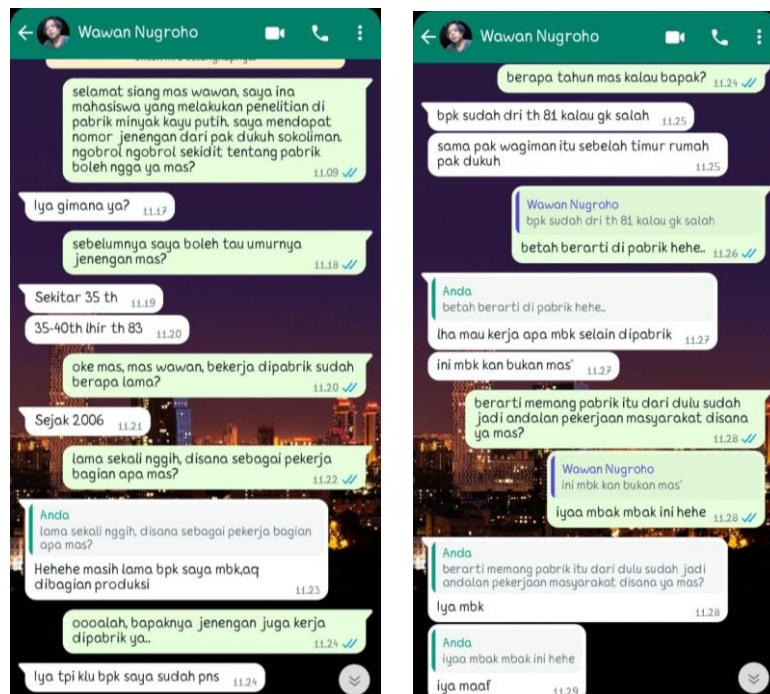


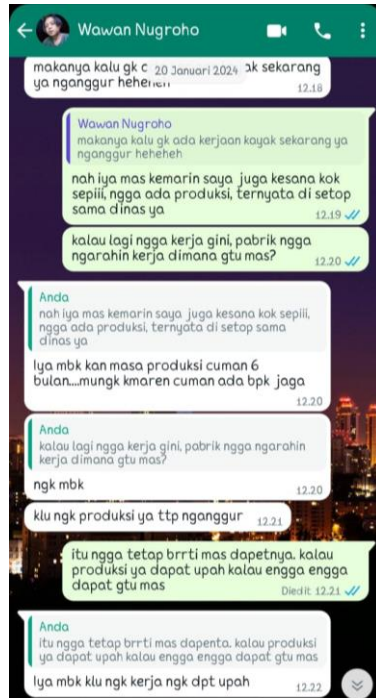






7. Wawancara online dengan pekerja Pabrik Pengolahan Kayu Putih





Wawan Nugroho

Anda
walah 24 jam kerja terus mas?
itu sambil jaga pabrik atau full waktu produksi?
Diedit: 12.14 ✓

Anda
mas wawan pernah ngoba bilang ke pihak pabrik untuk naik gaji atau belum mas?
Blm pernah mbk
12.16

Anda
kalu mas wawan pernah tanya ke temen pekerja lainnya, itu dari pekerja lain juga merasa kurang?
iya sama ttp aja kurang
12.16

Anda
walah 24 jam kerja terus mas?
iya sip cuman sehari semlm
12.17

Anda
itu sambil jaga pabrik atau full waktu produksi?
iya full mbk
12.17

kan 1 sip 9 orang
12.17

trus ada 2 sip
12.17

kerja borongan berarti ya
Diedit: 12.18 ✓

Anda
kerja borongan berarti ya
iya betul
12.18

Wawan Nugroho

Anda
keluarganya mas wawan ada yang tanam di lahan juga?
kalau ini mas
12.36 ✓

Anda
kalau ini mas
Ada mbk saya jga ikut tanem kok mbk
12.37

oalahh oke mas
12.39 ✓

masyarakat semua hampir ngolah di hutan Kayu putih mbk
12.39

pak dukuh wariyadi aja jga ada lahan di hutan kayu putih
12.39

asal tidak merusak pohon kayu putihnya ttp boleh ngolah lahannya
12.40

Wawan Nugroho
pak dukuh wariyadi aja jga ada lahan di hutan kayu putih
ini dukuh sama masyarakat dikasi berapa hektar mas?
12.40 ✓

beda beda apa sama
12.40 ✓

Anda
ini dukuh sama masyarakat dikasi berapa hektar mas?
tergantung yg mau ngolah lahannya mbk
12.41

Anda

Wawan Nugroho

walahhh, menurut mas wawan sebagai pekerja, kan jelas pabrik kasih upah, ada manfaat lain ngga mas ada pabrik disitu? atau malah sebenarnya keberatan
Diedit: 12.25 ✓

Anda
walahhh, menurut mas wawan sebagai pekerja, kan jelas pabrik kasih upah, ada manfaat lain ngga mas ada pabrik disitu? atau malah se...
Ya ada mbk kan lahan daun dihutan bisa diolah ditanem kacang jagung dan sebagainya itu manfaatnya
12.27

kalu berat sih ya keberatan kerja 24 jam lho mbk
12.28

Berarti keberatan buat sistem kerja untuk pekerja dipabriknya ya, kalau untuk masyarakat lahannya bisa dimanfaatin
12.31 ✓

keluarganya mas wawan ada yang tanam di lahan juga?
12.32 ✓

Anda
Berarti keberatan buat sistem kerja untuk pekerja dipabriknya ya, kalau untuk masyarakat lahannya bisa dimanfaatin
Btl mbk....tpi mau gimana lgi mbk berat ngk berat adanya kerjaan dipabrik situ ya ttp dikerjain soalnya, kalu saya dpt penghasilan cuman dari pabrik itu
12.33

Anda
keluarganya mas wawan ada yang tanam di lahan juga?

Wawan Nugroho

Anda
keluarganya mas wawan ada yang tanam di lahan juga?
12.36 ✓

Anda
kalau ini mas
Ada mbk saya jga ikut tanem kok mbk
12.37

oalahh oke mas
12.39 ✓

masyarakat semua hampir ngolah di hutan Kayu putih mbk
12.39

pak dukuh wariyadi aja jga ada lahan di hutan kayu putih
12.39

asal tidak merusak pohon kayu putihnya ttp boleh ngolah lahannya
12.40

Wawan Nugroho
pak dukuh wariyadi aja jga ada lahan di hutan kayu putih
ini dukuh sama masyarakat dikasi berapa hektar mas?
12.40 ✓

beda beda apa sama
12.40 ✓

Anda
ini dukuh sama masyarakat dikasi berapa hektar mas?
tergantung yg mau ngolah lahannya mbk
12.41

Anda



8. Surat Perizinan Penelitian



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DLHK

Jl. Argulobang No. 19, Baciro, Yogyakarta 55225 Telp (0274) 588518 Fax : (0274)512447
Email : dlhk@jogjapro.go.id website : dlhk.jogjapro.go.id

Yogyakarta, 12 Desember 2023

Nomor : 070/ 3092-1
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Ketua Program Sarjana Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"

di-
Yogyakarta

Menindaklanjuti surat Saudara dengan nomor 888//U/ 2023 pada tanggal 30 November 2023 perihal seperti pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan memberikan izin kepada Mahasiswa Saudara untuk melaksanakan penelitian dan pengambilan data di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY yang akan dilaksanakan pada:

Tanggal : 12 Desember 2023 s.d. 30 Januari 2024
Tempat : Pabrik Minyak Kayu Putih Sokoliman II
Balai KPH Yogyakarta
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY
Nama : Ina Nur Azizah Fajar A.
NIM : 20530031
Program Studi : Ilmu Komunikasi

Yang perlu diperhatikan adalah:

- Sebelum melaksanakan kegiatan harap melapor kepada Kepala Balai KPH Yogyakarta, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.
- Berpakaian rapi dan sopan serta menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan
- Menyampaikan laporan hasil penelitian berupa *soft/hard copy* ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

a.n KEPALA
SEKRETARIS,

CAHYANING FIAH, S.Si., M.Sc.
NIP. 197404041999032009

Tembusan:
1. Kepala Balai KPH Yogyakarta
2. Pengelola Pabrik MKP Sokoliman II
3. Mahasiswa yang bersangkutan